



DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

BerAKHLAK berakhlak mulia

RENCANA KERJA (R E N J A) TAHUN 2026



disbunnak_sulteng



disbunnaksulteng@gmail.com



(0451) 421862



Jl. R.A. Kartini No.25, & 31



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR: 000.7.2/251/Bappada - 9.59/2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf c angka 3 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 956);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal ... 6 oktober 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


ANWAR HAFID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026

1. Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Renja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Renja Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Renja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah;
9. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Renja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah;
12. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah;
14. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah;
15. Renja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah;
16. Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
17. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah;
18. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah;
19. Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah;
20. Renja Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
21. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah;

22. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah;
23. Renja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
24. Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah;
25. Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah;
26. Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah;
27. Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;
29. Renja Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah;
30. Renja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;
31. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
32. Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
33. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
34. Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
35. Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
36. Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
37. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Tengah;
38. Renja Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah;
39. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
40. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan sebagaimana dimutakhirkan terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Dokumen ini merupakan pedoman Perencanaan perangkat daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada Renstra dan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi dan misi Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang tertuang Ranwal RPJMD Sulawesi Tengah tahun 2025-2029.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Ranwal Renja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 ini kami ucapkan terima kasih.

Palu, 30 September 2025
Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Sulawesi Tengah



Dr. ROHANI MASTURA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661107 198603 2 004

DAFTAR ISI

BAB I.	Pendahuluan	
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Landasan Hukum	2
1.3.	Maksud dan Tujuan	5
1.4.	Sistematika Penulisan	6
BAB II.	Hasil Evaluasi Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan	
	Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Lalu	
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	
	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah	8
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan	
	Provinsi Sulawesi Tengah	32
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas	
	Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah	41
2.4.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	45
2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	56
BAB III.	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	
3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	63
3.2.	Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan	
	Provinsi Sulawesi Tengah	64
3.3	Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan	
	Provinsi Sulawesi Tengah	65
BAB IV.	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan	
	Provinsi Sulawesi Tengah	
4.1	Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Provinsi	70
BAB V.	Penutup	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan s/d Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Tengah (Indikator menggunakan Kepmendagri Nomor 3406 tahun 2024.....	9
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah	34
Tabel 2.3.	Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Tengah	46
Tabel 2.4.	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Tengah	57
Tabel 2.5.	Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Tengah	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Manajerial strategis yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Peternakan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi. Oleh karena itu, dokumen ini merupakan

acuan dan arahan bagi jajaran birokrasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Perkebunan dan Peternakan tahun 2026 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi, baik di dalam maupun antar sektor terkait.

Perencanaan Pembangunan Perkebunan dan Peternakan di daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Manajerial strategis yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Peternakan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi. Oleh karena itu, dokumen ini merupakan acuan dan arahan bagi jajaran birokrasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Perkebunan dan Peternakan tahun 2026 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait.

1.2 Landasan Hukum

1. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya
2. Landasan Operasional :
 - 1) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 4) Undang – undang nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- 5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan;

- 1) Peraturan Pemerintah No.40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan;
- 5) Peraturan Pemerintah No.40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 6) Peraturan Pemerintah RI No. 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9) Intruksi Presiden RI No. 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Wilayah Terpadu;
- 11) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 46/Kpts/PD. 300/1/2015 tentang Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional;
- 1) Peraturan Menteri Pertanian No. 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Pertanian No. 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024;
- 7) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 – 2850 tahun 2025 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 8) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
- 9) Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, tambahan lembar daerah Provinsi Sulawesi Tengah nomor 74).
- 10) Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126;
- 11) Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026
- 1) . Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 adalah :

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026.
2. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dalam pemilihan program dan kegiatan prioritas Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan strategi pembangunan sub sektor perkebunan dan peternakan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 adalah :

1. Menjamin tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah periode 2025 - 2029 di Sektor Pertanian Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan.
2. Menyusun arah kebijakan, strategi, sasaran, indikator sasaran, program prioritas serta kebutuhan pendanaan tahun 2026.
3. Mewujudkan koordinasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan subsektor perkebunan dan peternakan di Sulawesi Tengah yang holistik, terintegrasi dengan sektor lain guna meningkatkan efisiensi pembangunan daerah, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Memantapkan perencanaan pembangunan perkebunan dan peternakan yang terpadu, *integrated* dan berorientasi pada peningkatan produksi dan produktifitas melalui penetapan program dan kegiatan sesuai skala prioritas.
5. Mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang timbul selama dalam pelaksanaan program dan kegiatan, dukungan fiskal, kemampuan sumberdaya dan kesiapan kelembagaan teknis di lapangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian

Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi
Sulawesi Tengah

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan
Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi
Tengah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan dan
Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
- 3.3. Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan dan
Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Sulawesi Tengah

- 4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi

BAB V. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, adapun hasil evaluasi tersebut serta perkiraan realisasi capaian Target pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
dan Pencapaian Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
s/d Tahun 2024

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (intrinsik), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi
3		URUSAN PEMERINTAHAN PELIHAN								
3.27		BIDANG URUSAN PERTANIAN								
TOTAL ANGEMERAN										
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH										
3.27	2	Persediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan (Toni)							
			- Kelapa Dalam	220,707	201.978	201.065	98.38	194.714	193.783	98.38
			- Cengkeh	35,000	23.200	22.318	95.77	22.268	22.268	94.86
			- Kopi	3,041	2.874	2.418	118.94	123.919	123.919	98.21
			- Kakao	109,118	110.072	108.818	97.18	1.005	1.005	93.83
			- Pala	1,064	911	988	108.45	2.744	2.744	96.37
			- Kelapa Sawit	251,463	288.718	139.033	48.08	143.723	143.723	57.31
			Kelahiran Ternak Sapi (Ekar)							
			- Hasil Inovasi dan Bioteknologi (IBI)	41,500	10.000	9.433	94.33			
			- Hasil Kewilayatan (KA)	8,500	6.800	6.920	101.78	81.73	81.37	100.00
			Pemertanian Persebaran Sarana Perkebunan (Persen)							
			Pepelani Ternak (Ekar)							
			- Sapi					311.878	297.336	48.51
			- Kambing					198.889	78.176	13.65
			- Babi					327.353	129.891	39.63
			- Unggas					16.212.286	12.348.686	76.17
			Produksi Hijauan Pakan Ternak (Kgt)					438.000	3.737.310	1.387.38
3.27	3.1.02	Pengawasan Mutu, Persediaan dan Peredaran Beras Taniwan	Luas Area Intensifikasi Tanaman Perkebunan (Ha)							
			- Kakao	4,434	252.00	300.0	200.00	620	470	100.00
			- Cengkeh	2,929				79	15.46	20.00
			- Pala	888				83	83	100.00
			Luas Area Pemertanian Tanaman Perkebunan (Ha)							
			- Kakao	1,430	203.65	011.2	208.251	1078	5.243.811	178.02
			- Kelapa	413.3	181.00			530.4	1.372	523.87
			- Cengkeh	718	137.30			788.5	908	123.94
			- Kopi	419	131.20	23.8	23.84	475.03	1.111	233.94
			- Kelapa Sawit	100	11.00			13.37	238	1.937.17
			Luas Area Rehabilitasi Tanaman Perkebunan (Ha)							
			- Kakao	911						
			- Kelapa	138.75						
			- Cengkeh	340						
3.27	3.1.02	4	Pengawasan Mutu, Persediaan dan Peredaran Beras/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Persediaan dan Peredaran Beras/Bibit Perkebunan	1	1	100.00			
			Jumlah Laporan Kegiatan Pemertanian Tanaman perkebunan (Laporan)					1	1	100.00
			Jumlah Laporan Kegiatan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan (Laporan)					-	-	
			Jumlah Laporan Kegiatan Intensifikasi Tanaman Perkebunan (Laporan)					1	1	100.00
3.27	3.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pemertanian Pemertanian Pupuk (Persen)	100.00	100.00	100.00	100.00			
			Pemertanian Pemertanian Pestisida (Persen)	100.00	100.00	100.00	100.00			
			Pemertanian Pemertanian Alat dan Mesin Perkebunan (Persen)	100.00	100.00	100.00	100.00			

No	Kode					Uraian/ Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana s/d 2024	
									Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi
							Jumlah Kebutuhan Pupuk yang Diperakhi (Liter)					35.200	35.200	100,00
							Jumlah Kebutuhan Pestisida yang Diperakhi (Liter)					5.623	5.623	100,00
							Jumlah Kebutuhan Alat dan Mesin Perkebunan yang Diperakhi (Unit)					767	767,00	100,00
	3	27	2	1.01	1	Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alat dan sarana pendukung pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alat dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	1	1	100,00			
							Jumlah Laporan Verifikasi Data Kebutuhan Pupuk (Laporan)					1	1	100,00
							Jumlah Laporan Verifikasi Data Kebutuhan Pestisida (Laporan)					1	1	100,01
							Jumlah Laporan Verifikasi Data Kebutuhan Alat dan Mesin Perkebunan (Laporan)					1	1	100,02

No	Kode			Uraian/ Bidang Urusan Penguatan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Pengikat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana s/d 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi
3	27	2	1.03	Pengendalian dan Pengembangan Persebaran dan Produksi Hasil/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak serta Pakan Ransum/protein	Absorpsi Ternak Sapi (Ekor)	44	33.200	68.333	206,07			
					Luar Areal Tanaman Hijauan Pakan Ternak (SAT) (Ha)	62	10	10,90	109,00			
					Jumlah Kelahiran Ternak Sapi melalui Insusment Bantam (IB) (Ekor)					10.000	1.568	
					Jumlah Kelahiran Ternak Sapi melalui Kewan Awan (KA) (Ekor)					10.000	474	
					Jumlah Kelahiran Ternak Kambing melalui IB (Ekor)					30	-	
					Jumlah Kelahiran Ternak Kambing melalui KA (Ekor)					2.000	-	
					Luar Areal Pembudidayaan Pakan Penggembalaan dan Kewan Hijauan Pakan Ternak (SAT) (Lapangan)					-	-	
					Jumlah Kelahiran Alat Media Pemernakan yang Dipernaki (Unit)					-	-	
					Jumlah Ketersediaan Hasil/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan ternak yang Tersedia dan yang Dipernaki (Lapangan)	2	2	2	100,00			
					Jumlah Laporan Persebaran Ternak Sapi dan kambing (Lapangan)					2	2	100,00
3	27	3	1.04	Pengendalian Persebaran dan Produksi Hasil/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah laporan fasilitas Penggembalaan Pakan Penggembalaan dan Kewan Hijauan Pakan Ternak (SAT) (Lapangan)					1	1	100,0
					Jumlah laporan fasilitas Alat Media Pemernakan (Lapangan)					1	1	
				Pengendalian dan Pengembangan Ransum Pertanian	Investasi Pemenuhan Perkelahan (Unit Usaha)		1	1	100,00			
					Persebaran Tingkat Serangan OPT Perkelahan (Persen) :							
					- Kakan	33,86	81,05	81,73	98,73			
					- Kelapa	99,37	87,17	87,73	98,88			
					- Cengkeh	9,81	18,81	18,50	188,88			
					- Kopi	7,80	14,80	19,00	194,80			
					Persebaran Kelompok yang Difasilitasi Pengendalian OPT Perkelahan (Persen)							
					- Kakan					15,38	15,38	100,00
					- Kelapa					0		
3	27	03	1.01	Pengendalian dan Pengembangan Ransum Pertanian Persebaran Persebaran	Rekomendasi Teknis PDS (Dokumen)	1	1					
					Luar Areal Pengendalian OPT Perkelahan (Ha)							
					- Kakan	1.700	800	875	84,38			
					- Kelapa	1.400	-	-	-			
					- Cengkeh	1.300	1.300	-	-			
					- Kopi	300	-	-	-			
					Jumlah Luas Areal Pengendalian Tersebar Serangan OPT Perkelahan (Ha)							
					- Kelapa Dalam					0		
					- Cengkeh					0		
					- Kelapa					100	100	100,00

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (instrumen), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Pengantar Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana s/d 2024	
								Target Revisi Tahun 2023	Realisasi Revisi Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi
						Pemenuhan Perencanaan Perkebunan yang Dilulus (persen)					32,83	32,83	100,00
	3	27	05	1.01	03	Pengembangan, Pemertanahan Kelokan Lahan, dan Gampang Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Pengembangan, Pemertanahan Kelokan Lahan, dan Gampang Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Ha)	100	100	100			
						Jumlah Laporan Pemertanahan Perkebunan perkebunan (Laporan)							
	3	27	05	1.01	04	Pengendalian Organisasi Pengganga Tani (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisasi Pengganga Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dilandaskan (Ha)						
						Kelapa	1.750	900	625	84,38			
						Kelapa	1.400	-	-	-			
						Cengkeh	1.300	150	-	-			
						Kopi	100	-	-	-			
						Jumlah Laporan Pengendalian Organisasi Pengganga Tanaman (OPT) kelapa, duren, cengkeh, pala, kopi, kakao dan kelapa sawit (Laporan)					1	1	100,00
						Jumlah Laporan Pemertanahan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat (Laporan)					0	0	
						Jumlah Laporan Kepertanian Tertinggi (KPT) (Dokumentasi Statistik dan Peta) (Laporan)					0	0	
						Jumlah Laporan Pemertanahan Perkebunan perkebunan (Laporan)					1	1	100,00
	3	27	05			Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100,00	26,77	26,73	99,89			
						Kendaraan Usaha Produk Hasil Perkebunan (Dokumen)	3	3	-	-			
						Kendaraan Usaha Produk Hasil Perkebunan (Dokumen)	3	3	3	100,00			
						Penyediaan Prasarana Pertanian (Persen)					74,13	74,13	100
						Penyediaan Kelompok Yang Telah Menghasilkan Produk Olahan Hasil Perkebunan (Persen)					76,87	76,87	100
	3	27	05	1.01		Pertanian Prasarana Pertanian	350	100	100,00	100,00			
						Peningkatan Prasarana Pertanian Perkebunan (L/100)	54	3	3	100,00			
						Kelompok Usaha yang Memiliki Standar Mutu Hasil Perkebunan (Kelompok)	3	3	3	100,00			
						Unit Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan (Unit Usaha)	3	6	7	116,67			
						Jumlah Fasilitas Pengolahan Lahan dan Air (Kelompok)					0	-	
						Jumlah Kelompok Yang Telah Menghasilkan Produk Olahan Hasil Perkebunan (Kelompok)					10	8	80

No	Kode				Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana s/d 2024	
								Target Revisi Tahun 2023	Realisasi Revisi Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi
	3	27	03	1.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penggalian Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penggalian Jalan Usaha Tani (Dokumen)	1	1	100.00			
	3	27	03	1.04	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penggalian Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penggalian Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (dokumen)	1	1	100.00			
						Jumlah Laporan Isu/Isi Penggalian Lahan dan Air (Laporan)					1	1	100.00
	3	27	03	1.04	02	Pengendalian dan Pemertan Prasarana, Kewasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemertan Prasarana, Kewasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	2	2	100.00			
						Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Mutu Penggalian dan Pemertan Hasil Perkebunan (Laporan)					1	1	100.00
	3	27	02			Penyuluhan Pertanian	Kelompok Tani yang Menerapkan Teknologi (Kelompok)						
						Kelompok Tani Perkebunan	45	44	64	100.00			
						Kelompok Tani Peternakan	40	44	80	175.00			
						Persentase Kelompok Perkebunan dan Peternakan yang Bersertifikat Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) (Persen)					29.89		

No	Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Bemtra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Bemtra s/d 2024		
					Target Rejua Tahun 2023	Realisasi Rejua Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi	
	3.27.02	1.02	Pengembangan Pemukiman Penyuluhan Pertanian	Kelompok Tani yang Diklat (Kelompok)							
			- Kelompok Tani Perkebunan	80	84	105,00					
			- Kelompok Tani Peternakan	80	80	100,00					
			- Perikanan Kelompok Tani yang Nakh Kelas								
			- Kelompok Tani Perkebunan					29,58			
			- Kelompok Tani Peternakan					29,58			
	3.27.02	1.02	03	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)						
			- Kelompok Tani Perkebunan	80	84	105,00					
			- Kelompok Tani Peternakan	80	80	100,00					
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kelompok Perkebunan (Laporan)					4	1		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Penyuluhan Kelompok Peternakan (Laporan)					1	1		
3	27.04		Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Status Kesehatan Hewan (%)	90	87	96,66	113,33	96,6	99,89	101,22
			Persentase Uji Usaha yang ASHEH (%)	18,18	13,15	18,18	126,96				
			Persentase Uji Usaha Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUHU yang Memiliki Nomor Raster Veteriner (NRV) (Persen)					199	87,50	87,58	
			Pengawasan Kesehatan Hewan, Pemusnahan dan Pendidikan Daerah Wilayah Penyakit Hewan Menurut Listus Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Prevalensi Penyakit Hewan Menular (%)	0	0	1,35	41,07			
			Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Menular(Zoonosis) (Persen)								
			- Rabies					< 2	0,0077		
			- ASF					< 2	0,00013		
			- PMR					< 2	0,0076		
			- Anthrax					< 2	0,1384		
			- Schistosomiasis					< 2			
			- Brucellosis					< 2			
			Pengawasan Pemusnahan dan Penghinaan Hewan dan Produk Hewan Listus Daerah Provinsi	Jumlah Uji Usaha yang Memiliki Sertifikat NRV (Ust Usaha)				22	38		
3	27.04	1.03	01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Laporan)	0	1	100,00			
3	27.04	1.03		Pengawasan Pemusnahan dan Penghinaan Hewan dan Produk Hewan Listus Daerah Provinsi	Ust Usaha yang Memiliki NRV (Norma Raster Veteriner) (Ust Usaha)	0	11	220,00	22		
3	27.04	1.03	01	Prevalensi Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Prevalensi Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan (Laporan)	2	1	100,00			
			Pengawasan Pemusnahan	Jumlah Uji Usaha yang Memiliki Status Keamanan Produk Hasil Pemusnahan (Ust Usaha)				0	0		
			Pendaurulangan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan penyediaan obat-obatan, vaksin dan vaksin yang disediakan (Laporan)			1	1	1	100,00	

No	Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (utama), Kegiatan (support) dan Sub Kegiatan (support)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana s/d 2024				
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi			
			Jumlah laporan pengawasan olah hewas (Laporan)					2	2	100.00			
			Jumlah Laporan pelayanan vaksinasi dan pengujian hewas (Laporan)					1	1	100.00			
			Jumlah laporan pengawasan lalu lintas ternak antar provinsi (Laporan)					1	1	100.00			
			Jumlah laporan pelayanan pada Pukonman (Laporan)					1	1	100.00			
			Jumlah laporan pengembalian dan pengamanan Gangguan Reproduksi (Gangrep) pada sapi betina produktif (Laporan)					1	1	100.00			
		Pengawasan dan Pemeliharaan Kesehatan Hewas, Produk Hewas dan Media Pemelihara Penyakit Hewas Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempa Pemukiman PPM	Jumlah laporan produksi sapi usaha produk pangan asal hewas (Laporan)					1	1	100.00			
			Jumlah laporan pengawasan tegernu ternak pada sapi usaha produk pangan asal hewas (Laporan)					1	1	100.00			
			Jumlah laporan pelayanan pemutihan dan pengubahan produk pangan asal hewas (Laporan)					1	1	100.00			
			Jumlah laporan pengendalian pemutihan sapi betina produktif (Laporan)					1	1	100.00			
		Pengendalian dan Pemeliharaan Kesehatan Peternakan	Jumlah laporan fasilitas alat pengkajian hasil peternakan yang dilakukan (Laporan)					1	1	100.00			
			Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Alat Pengkajian Hasil Peternakan (Laporan)					1	1	100.00			
			Jumlah laporan pelayanan informasi Pasar Harga Komoditas Peternakan (Laporan)					1	1	100.00			
			Jumlah Laporan hasil Lomba Cipta Obahan Produk Peternakan (Laporan)					1	1	100.00			
			Jumlah Laporan monitoring desa kempati sapi (Laporan)					1	1	100.00			
3	27	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SARIP Dinas Perkebunan dan Peternakan	88	85	88.90	103.53					
			Perentase Realisasi Anggaran (Persen)		93	91.82	98.48						
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		88	83.98	108.35						
3	27	04	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja (Dokumen)	18	18.00	100.00					
				Nilai SARIP Dinas Perkebunan dan Peternakan				89.00					
3	27	05	1.01	1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	0	0	0	100.00	1	1	100.00

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana s/d 2024	
								Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi
3	27	01	1.02	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	3	100.00			
						Jumlah dokumen informasi dan statistik Dinas Perkebunan dan Perikanan (dokumen)					1	1	100.00
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	6	6	100.00			
						Jumlah dokumen evaluasi dan kinerja Dinas Perkebunan dan Perikanan (dokumen)					1	1	100.00
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran (Laporan)	3	3	3	100.00			
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	272	249	104	77.91			
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	1	100.00	1	1	100.00
3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3	3	1	100.00			
3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengolahan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1	1	100.00	1	1	100.00
3	27	01	1.03	04	Pertemuan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pertemuan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1	100.00	1	1	100.00
3	27	01	1.06		Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketertarikan dan kepegawaian (Laporan)	1	1	1	100.00			
						Indeks Tata Kelola Pengelolaan Barang dan Jasa Dinas Perkebunan dan Perikanan					00		

No	Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (intrinsik), Kegiatan (input) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana s/d Tahun 2024	
					Target Benja Tahun 2023	Realisasi Benja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi
3	27.01.1.06.04	Penyediaan Korprenan Instalasi Listrik/ Pemasangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Korprenan Instalasi Listrik/Pemasangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	-	-	-	-	-
3	27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1	100.00	-	-	100.00
3	27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	-	-	1	1	100.00
		Penyediaan Korprenan Instalasi Listrik/ Pemasangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Korprenan Instalasi Listrik/Pemasangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Laporan)					1	1	100.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Laporan)					1	1	100.00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)					1	1	100.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TLHP HPK dan APSP Ditua Perkebunan dan Perikanan (Penera)					00		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen TLHP Yang Di Sediakan (Dokumen)					1	1	100.00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji (Laporan)					1	1	100.00
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)					1		
3	27.01.1.06	Pengadaan Barang MIBK Daerah Pemasangan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang MIBK Daerah Pemasangan Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	1	1	1	100.00	1		100.00
3	27.01.1.07.03	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	1	1	100.00			
3	27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	101	9	9	100.00			
3	27.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1	100.00			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Laporan Pengadaan Mebel pada Dinas Perkebunan dan Perikanan (Laporan)					1	1	100.00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Dinas Perkebunan dan Perikanan (Laporan)					1	1	100.00
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Dinas Perkebunan dan Perikanan (Laporan)					1	1	100.00
		Administrasi Barang MIBK Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang MIBK Daerah (Laporan)					1		
		Perencanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang MIBK Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang MIBK daerah pada SKPD (Laporan)					1	1	100.00
3	27.01.1.08	Penyediaan Jasa Pemasangan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemasangan Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	1	1	1	100.00			
			Indeks SPRE Ditua Perkebunan dan Perikanan (Indeks)					00		

No	Kode				Uraian/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana s/d Tahun 2024	
								Target Rencana Tahun 2023	Realisasi Rencana Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi
						Indeks Pelayanan Publik (IPP) Urban, Perumahan dan Peternakan (Indeks)					60		
						Tingkat Digitalisasi Arasp Urban Perumahan dan Peternakan (Indeks)					62		
	3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dipevikan (Laporan)	1	1	100.00	1	1	100.00
	3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Dipevikan (Laporan)	1	1	100.00	1	1	100.00
	3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Urutan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urutan Kantor yang Dipevikan (Laporan)		1	100.00			
						Penyediaan Jasa Pelayanan Urutan Kantor	Jumlah Laporan SPBE pada Urutan Perumahan dan Peternakan (Laporan)				1	1	100.00
						Penyediaan Jasa Pelayanan Urutan Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik (Laporan)				1	1	100.00
						Penyediaan Jasa Pelayanan Urutan Kantor	Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan Arasp Urban dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian (Laporan)				1	1	100.00
						Penyediaan Jasa Pelayanan Urutan Kantor	Jumlah Laporan Deskripsi Kualitas ASN (Laporan)				1	1	100.00
						Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Dipevikan (Laporan)				1	1	100.00
	3	27	01	1.08		Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Pemangaj Urutan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Pemangaj Urutan Pemerintahan Daerah (Laporan)	1	1	100.00	1		
	3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipevikan dan Dihayarkan Pajak dan Perawatannya (Lap)	299	298	100.00			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Laporan)				1	1	100.00
	3	27	01	1.08	06	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipevikan (Lap)	105	113	100.00			
							Jumlah Laporan Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya (Laporan)				1	1	100.00
	3	27	01	1.08	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipevikan/Rehabilitasi (Lap)	3	3	100.00			
							Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Laporan)				1	1	100.00
	3	27	01	1.08	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipevikan/Rehabilitasi (Lap)	21	21	100.00			
							Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Laporan)				1	1	100.00
	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Sertifikat Kepegawaian Masyarakat (Laporan)		3	100.00			

No	Kode				Uraian/ Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana s/d 2024	
								Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi
	3	27	04	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	100.00	1	1	100.00
	3	27	05	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	876	87	220.80			
						Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)					1	1	100.00

No	Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Pemerintah Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana s/d Tahun 2024	
					Target Rencana Tahun 2023	Realisasi Rencana Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi
UPT PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN										
	3/27/05		Pengendalian dan Penyelenggaraan Rencana Peruntukan	Presentase Tingkat Serangan OPT Perkebunan (Persen) :						
				- Kakas	33,00	31,84	96,48	30,20		
				- Kelapa	39,37	47,17	119,88	38,90		
				- Cengkeh	9,81	16,81	171,37	101,81		
				Presentase rata-rata penurunan intensitas serangan OPT Tanaman Perkebunan pada kelompok terapan						
				- Kakas				23,18		
				- Kelapa				18,97		
				- Cengkeh				12,66		
	3/27/05	1.01	Pengendalian dan Penyelenggaraan Rencana Peruntukan Provinsi	Jumlah Penyerbukan Teknologi Pengendalian OPT (Kelompok)	40	40	100	45,00		
				Jumlah Dokumen Rujukan Pengembangan Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan (Dokumen)				1	1	100,00
				Jumlah Profilasi Agen Pengendali Hayati (APH) (Liter)				4100	4100	100,00
				Jumlah Alat Pemusnahan Teknologi Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan (Bak)				1000	100	10,00
	3/27/05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Lasi Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dihendahkan (Ha)					
				- Kakas	100	100	100,00	110,00		
				- Cengkeh	100	100	100,00	100,00		
				- Kelapa	1.001	100	200,00	200,00		
				Jumlah Laporan Identifikasi Serangan OPT Tanaman Perkebunan (Laporan)				3	3	100,00
				Jumlah Laporan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Tanaman Perkebunan (Laporan)				1	1	100,00
	3/27/05		Program Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Dinas Perkebunan dan Peternakan		83	88,00	103,33		
				Presentase Realisasi Anggaran (Persen)		93	93,37	96,39		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		80	81,08	106,35		
				Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perkebunan dan Peternakan						

No	Kode	Uraian/ Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (instrumen Kegiatan output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Bersuara Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana s/d 2024	
					Target Berja Tahun 2023	Realisasi Berja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi
3	07 01	1.02	Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran (Laporan)	1	1	100.00			
3	07 01	1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	100.00			
3	07 01	1.06	Administrasi Umum	Jumlah dokumen ketentusahan dan pengesahan (Laporan)	1	1	100.00	1	1	100.00
3	07 01	1.06 02	Penyediaan Peraturan dan Peringghapan Kantor	Jumlah Paket Peraturan dan Peringghapan Kantor yang Diresahkan (paket)	1	1	100.00			
				Jumlah Laporan Penyediaan Peraturan dan Peringghapan Kantor (Laporan)				1	1	100.00
3	07 01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Diresahkan (Paket)	1	1	100.00			
				Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Laporan)				1	1	100.00
3	07 01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangjang Uraian Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangjang Uraian Pemerintahan Daerah (Laporan)	1	1	100.00			
				Jumlah Laporan Penambahan Barang Milik Daerah Pemangjang Uraian Pemerintahan Daerah (Laporan)						
3	07 01	1.07 06	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipesan (Unit)	3	3	100.00			
3	07 01	1.09	Penambahan Barang Milik Daerah Pemangjang Uraian Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penambahan Barang Milik Daerah Pemangjang Uraian Pemerintahan Daerah (Laporan)	1	1	100.00	1	1	100.00
3	07 01	1.09 02	Penyediaan Jasa Perbaikan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perlitan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan Diperikan Pajak dan Perlitannya (Unit)	13	13	100.00			
				Jumlah Laporan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan Diperikan Pajak dan Perlitannya (Laporan)				1	1	100.00
	01	1.09 06	Penambahan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Diperiksa (Unit)	13	13	100.00			
UPT PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH										
3	07 02		Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Berth Berasut dan Bersertifikasi (Pohon)						
			Kakao	347,782	330.000	332.768	152,22			
			Kelapa Dalam	37.864	80.000	237,322	429,87			
			Kopi	115,827	100.000	98,876	85,45			
			Cengkeh	17,388	25.000	31,813	127,81			
			Pada	5,786	7.000	139,818	1.849,84			
			Lada	2,319						
			Kelapa Sawit	37.864	70.000	35,382	177,81			
			Kelapa Gajah	588	558	42,987	7.881,27			
			Nilam	11,233						
			Kakur	4.138	-	-	-			
			Perawatan Berth Tanaman Perkebunan Yang Layak Salat (Person)					90	92,22	182,47
3	07 02	1.02	Pengurusan Mutu, Penyediaan dan Perlatan Berth Tanaman	Jumlah Berth Unggul yang Layak Salat (Pohon)						
			Kakao	347,782	330.000	332.768	152,22			
			Kelapa Dalam	37.864	80.000	237,322	429,87			
			Kopi	115,817	100.000	98,876	85,45			
			Cengkeh	17,388	25.000	31,813	127,81			

No	Kode	Unitas/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangka Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana s/d 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi
			- Pola	3.790	7.000	128,838	1.840,04			
			- Lada	2.338	-	-	-			
			- Kelapa Sawit	57,84	20.000	95,362	477,81			

No	Kode	Uraian/ Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (instrumen), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana s/d 2024	
					Target Rencana Tahun 2023	Realisasi Rencana Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi
			- Kelapa Gajah	580	550	42,007	7.801,27			
			- Nelayan	11.251	-	-	-			
			- Kelapa	1.138	-	-	-			
			Pemantauan Berkebun Bersertifikat yang Bersandar (Persen)	100	100	100	100,00			
			Pemantauan Pohon Induk Unggul yang Diistapkan (persen)	40	40	-	-			
			Rekomendasi Iata Usaha Perkebunan (Dokumen)	1	1	1	100,00			
			Jumlah Surat Rekomendasi Pemertkuan Mata Berkebun (Surat)					10	3	7,00
			Jumlah Sertifikat Mata Berkebun (Sertifikat)							
			- Pula					10	13	130,00
			- Kapt					1	15	214,29
			- Unggul					8	8	100,00
			- Kelapa Sawit					5	6	120,00
			- Kelapa Dalam					18	43	261,11
			- Kelapa Gajah					3	4	83,00
			- Kelapa					30	30	100,00
			Jumlah Rekomendasi Calon Kabin Berkebun Berkebun (KSR) yang Diistapkan (Dokumen)					2	8	400,00
			Pemantauan Penyelidikan Kabin Pemantauan berkebun yang tidak bersertifikat (Persen)					100	100	100,00
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kabin Berkebun Berkebun (KSR) Perkebunan (Dokumen)					1	1	100,00
			Jumlah Rekomendasi Calon Perkebun Berkebun Tanaman Perkebunan (Rekomendasi)					4	9	225,00
	1.27.02	1.02	01	Pengelolaan Pemertkuan Sertifikat Berkebun	70	65	98	135,38		
			Jumlah Laporan Pengajuan Sertifikat Berkebun Rekomendasi Perkebunan di Laboratorium (Laporan)					1	1	100,00
			Jumlah Laporan pelaksanaan sertifikasi mata berkebun (Laporan)					1	1	100,00
			Jumlah laporan hasil identifikasi calon kebun berkebun berkebun (Laporan)					1		
	1.27.02	1.02	04	Pengawasan Mata, Penyelidikan dan Pemertkuan Berkebun Berkebun Perkebunan	1	1	1	100,00		
			Jumlah Laporan Pengawasan Pemertkuan Berkebun Tanaman Perkebunan (Laporan)					1	1	100,00

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana s/d 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi
			Jumlah laporan evaluasi Kelayakan Rehab Sumber Daya (KSD) Perkebunan (Laporan)					1	1	100.00
			Jumlah laporan verifikasi cakupan produksi berkah tanaman perkebunan (Laporan)					1	1	100.00

No	Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana s/d 2024	
					Target Rencana Tahun 2023	Realisasi Rencana Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi
3	27.01		Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Dinas Perkebunan dan Peternakan	80	86,00	103,53			
				Persentase Realisasi Anggaran (Persen)	90	91,07	98,99			
				Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80	83,08	104,35			
				Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perkebunan dan Peternakan						
3	27.01	1.01	Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran (Laporan)	1	1	100,00			
3	27.01	1.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Laporan)	1	1	100,00			
3	27.01	1.08	Administrasi Umum	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian (Laporan)	1	1	100,00	1	1	100,00
3	27.01	1.08	01 Penyediaan Perlakuan dan Pengembangan Karier	Jumlah Paket Perlakuan dan Pengembangan Karier yang Dihasilkan (Paket)	1	1	100,00			
				Jumlah Laporan Penyediaan Perlakuan dan Pengembangan Karier (Laporan)				1	1	100
3	27.01	1.08	03 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dihasilkan (Paket)	1	1	100,00			
				Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Laporan)				1	1	
3	27.01	1.08	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	100,00	1	1	100,00
3	27.01	1.07	Pengadaan Barang/M&B Daerah Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang M&B Daerah Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	1	1	100,00			
3	27.01	1.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dihasilkan (Unit)	33	7	14,24			
3	27.01	1.08	Penyediaan Jasa Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	1	1	100,00	1	1	100,00
3	27.01	1.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dihasilkan (Laporan)	1	1	100,00	1	1	100,00
3	27.01	1.09	Penyediaan Jasa Perawatan, Biaya Perawatan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Perawatan Barang M&B Daerah Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	1	1	100,00	1	1	100,00
3	27.01	1.09	02 Penyediaan Jasa Perawatan, Biaya Perawatan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan Diperbarui Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0	100,00			
				Jumlah Laporan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan Diperbarui Pajak dan Perizinannya (Laporan)				1	1	
UPT BALAI PEREMBIHAN TANAMAN PERKEBUNAN										
3	27.02		Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan (Ton)						
				- Kelapa Dalam	226.773	204.076	201.663	88,38		
				- Cengkeh	31.934	23.200	22.238	69,77		
				- Kopi	2.984	2.874	3.419	118,84		
				- Kakao	174.432	150.073	138.450	87,19		
				- Pala	1.955	921	980	106,43		
				- Kelapa Sawit	281	-	139.855	-		
				Jumlah Potensi Ketersediaan Hasil (potensi)						
				- Kelapa Dalam				924.888	924.888	100,00
				- Cengkeh				1.609.478	1.609.478	100,00
				- Kakao				1.132.990	1.132.990	100,00
				- Pala				167.864	167.864	100,00
				- Kopi				0		

No	Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana s/d 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi
	3 27 02 1.02	Pengawasan Mata, Penyediaan dan Pemeliharaan Benih Tanaman	Ketersediaan Benih Tanaman Perkebunan yang Unggul dan Bersih (Pohon)							
			- Lada	400.171						
			- Kelapa	904.000	894.000	894.000	100,00			
			- Kakao	1.532.000	932.000	932.000	100,00			
			- Kopi	22.800	158.000	158.000	100,00			
			- Jeruk Nipis	406.171	22.800	22.800	100,00			
			- Lada							
			- Cengkeh	1.679.278	1.620.478	1.620.478	100,00			
			- Pala	943.440	626.320	626.320	100,00			
			- Kakao	200.000						
			- Kelor	450.000						
			Jumlah perbanyakan bahan sebagai sumber benih (Bt)							
			- Kelapa Dalam					0		
			- Kelor					2	2	100,00
			- Kopi					1		
			Jumlah Pemeliharaan Kelor Sebagai Sumber Benih (Bt)							
			- Kelapa Dalam					20	20	100,00
			- Kelor					3	3	100,00
			- Kopi					0		

No	Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana s/d 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi
	3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mata, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perikanan	Jumlah Pengawasan Mata, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perikanan (Laporan)	2	2		100.00			
			Jumlah Laporan pemantauan sarana dan prasarana perikanan/kegiatan perikanan sebagai sumber benih (Laporan)							
			- Kelapa Dalam (Cocos Nucifera)					1	1	100.00
			- Kupu (Coffea SP)					0		
			- Euteria Kakao (Theobroma Cacao L.)					0		
			Jumlah Laporan Sarana dan Prasarana perikanan/kegiatan perikanan sebagai sumber benih (Laporan)							
			- Kelapa Dalam (Cocos Nucifera)					1	1	100.00
			- Kupu (Coffea SP)					0		
			- Euteria Kakao (Theobroma Cacao L.)					0		
		Pengawasan Mata dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perikanan	Luar Area Pertumbuhan Kebun sebagai Sumber Benih Cengkeh dan Pala (Ha)					0		
			Jumlah Penanaman Kebun sebagai Sumber Benih (Ha)					10		
			- Cengkeh					9	9	100.00
			- Pala					1	1	100.00
			Jumlah Laporan pertumbuhan kebun/kegiatan perikanan/kegiatan perikanan sebagai sumber benih cengkeh (Sprayung Arumutarak) dan pala (Myrtica Fragrans) (Laporan)					0		
			Jumlah Laporan pertumbuhan kebun/kegiatan perikanan/kegiatan perikanan sebagai sumber benih cengkeh (Sprayung Arumutarak) dan pala (Myrtica Fragrans) (Laporan)							
			- Cengkeh (Sprayung Arumutarak)					1	1	100.00
			- Pala (Myrtica Fragrans)					1	1	100.00
3	37.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Dinas Perikanan dan Peternakan		78.85	88.00	101.53			
			Perentase Realisasi Anggaran (Persen)			91.62	96.44			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)			85.08	106.35			
			Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perikanan dan Peternakan							
3	37.01.1.02	Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran (Laporan)	1	1		100.00			
3	37.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1		100.00			
3	37.01.1.06	Administrasi Umum	Jumlah dokumen ketertarikan dan kepegawaian (Laporan)	1	1		100.00	1	1	

No	Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana s/d 2024		
					Target Riau Tahun 2023	Realisasi Riau Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi	
	3	27.01	1.06	02	Penyediaan Perlakuan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlakuan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	100.00		
					Jumlah Laporan Penyediaan Paket Perlakuan dan Perlengkapan Kantor (Laporan)			1	1		
	3	27.01	1.08		Penyediaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	1	1	100.00	1	100
	3	27.01	1.08	02	Penyediaan Jasa Konsultansi, Survei Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Konsultansi, Survei Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	100.00	1	100.00
	3	27.01	1.08		Penelitian dan Rancang MIB Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penelitian dan Rancang MIB Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	1	1	100.00	1	100.00
	3	27.01	1.09	03	Penyediaan Jasa Penelitian, Rupa Penelitian, Pajak dan Perizinan Kebutuhan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kebutuhan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperlukan dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	10	100.00		
					Jumlah Laporan Kebutuhan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperlukan dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Laporan)			1	1		
UPT PEMERINTAHAN TERNAK											
	3	27.02			Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kelahiran Sapi Daging Sumber Daya Genetik Hewan (Skor)	8.640	8.640	100.00		
					Persentase Stroh (Semen Bekas) Standar Nasional Indonesia (SNI) yang Disediakan (Persen)				100	100	100.00
	3	27.02	1.04		Peningkatan Ketahanan dan Mutu Hasil/Bahan Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kandang Perikanan	Stroh Sapi Daging yang Disediakan (Skor)	24.000	24.000	100.00		
					Produk Pakan (Kg)	140.000	140.000	100.00			
					Jumlah Produk Stroh (Semen Bekas) Standar Nasional Indonesia (SNI) (Ternak)				12.000	12.363	103.04
					Produk Hewan Pakan Ternak (HPT) dan Konsentrat (Kg)				143.675	143.780	100.07
	3	27.02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Hasil/Bahan Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kandang Perikanan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Hasil/Bahan Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kandang Perikanan (Laporan)	2	2	100.00		
					Jumlah Laporan Kegiatan Produk Stroh Semen Bekas (Laporan)				1	1	
					Jumlah Laporan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan HPT dan Konsentrat UPT Perikanan Ternak (Laporan)				1	1	
	3	27.01			Program Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Dinas Perikanan dan Peternakan		78.05	86.98	110.15	
					Persentase Realisasi Anggaran (Persen)				91.82	96.44	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)				83.88	100.33	
					Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perikanan dan Peternakan						
	3	27.01	1.02		Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran (Laporan)	1	1	100.00		
	3	27.01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	100.00		

No	Kode				Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (internel, Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana s/d 2024	
								Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi
3	27	01	1.04		Administrasi Umum	Jumlah dokumen ketertarikan dan kepengurusan (Laporan)	1	1	1	100.00			
3	27	01	1.04	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	-	-			
						Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Laporan)					1	1	100.00
		01	1.04	03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	-	-			
						Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Laporan)					1	1	100.00
3	27	01	1.02		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	1	1	1	100.00			
3	27	01	1.02	03	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan (Paket)	1	1	1	100.00			
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	35	0	7	100.00			
3	27	01	1.04		Penyediaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	1	1	1	100.00			
3	27	01	1.04	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	100.00			
3	27	01	1.03		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	1	1	1	100.00			
3	27	01	1.04	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinasnya (Unit)	22	22	22	100.00			
						Jumlah Laporan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinasnya (Laporan)					1	1	100.00
3	27	01	1.03	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang dipelihara (Unit)	187	187	102	100.00			
						Jumlah Laporan Peralatan dan Mesin Lainnya Yang dipelihara (Laporan)					1	1	100.00
3	27	01	1.04	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1	1	1	100.00			
UPT VETERINER													
3	27	04			Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Status Kesehatan Hewan (%)	90	90	98.66	113.33			
						Persentase Unit Usaha yang ASUH (%)	18.18	18.18	18.18	120.00			

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (instrumen), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana s/d 2024	
								Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi
						Presentase Jumlah Sampel Asal Hewan Yang Memenuhi Persyaratan Standar Hasil Uji (Persen)					80	96,38	124,23
						Presentase Pangan Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan (Persen)					75	73,15	97,53
	3	27	04	1.03	Pemetaan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Pelaksanaan Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi (Laporan)	1	1	1	100,00			
						Jumlah Sampel Asal Hewan yang diuji (Sampel)					12.500	21.000	172,87
	3	27	04	1.03	01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi (Unit)	1	1	1	10,07			
						Jumlah Laporan Hasil Uji (LHU) Sampel (Laporan)					1	1	100,00
						Jumlah Laporan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Kesehatan Hewan (Laporan)					1	1	100,00
						Jumlah Laporan Pelayanan Pada Klinik Hewan (Laporan)					1	1	100,00
						Jumlah Laporan Ketertarikan Bahan Uji Laboratorium dan Obat - Obatan Hewan (Laporan)					1	1	100,00
	3	27	04	1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Sertifikasi Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Bahan Pangan Asal Hewan (Sertifikat)	325	325	236	102,75			
						Jumlah Skor Ketercapaian Produk Hewan (SRPH) (Dokumen)					280	514	197,89

No	Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana s/d 2024				
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi			
	3	27.04	1.04	01	Pengelolaan Persertifikat Kepemilikan Produk Hewan	Jumlah Sertifikat Kepemilikan Produk Hewan (Sertifikat)	303	303	226	102.73			
					Jumlah Laporan Pelayanan Pengujian Mutu Produk Asal Hewan (PAFH) (Laporan)					1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Kesehatan Masyarakat Virologi (Laporan)					1	1	100.00	
	3	27.01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Dinas Perumahan dan Pemukiman	79.01	88.00	103.53				
					Persentase Realisasi Anggaran (Persen)			91.62	9				
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)			81.08	106.23				
					Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perumahan dan Pemukiman								
	3	27.01	1.01		Administrasi Keuangan	Jumlah laporan Realisasi Anggaran (Laporan)	1	1	1	100.00			
	3	27.01	1.02	01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	1	100.00			
	3	27.01	1.03		Administrasi Umum	Jumlah dokumen ketertarikan dan kepegawaian (Laporan)	1	1	1	100.00	1	1	100.00
	3	27.01	1.03	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dipelekan (Paket)	1	1	1	100.00			
					Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Laporan)					1	1	100.00	
	3	27.01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	1	1	1	100.00			
	3	27.01	1.07	03	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Dipelekan (Paket)	1	1	1	100.00			
	3	27.01	1.07	04	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelekan (Unit)	35	-	3	100.00			
	3	27.01	1.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Perbaikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Perbaikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelekan (Unit)	1	1	1	100.00			
	3	27.01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	1	1	1	100.00	1	1	100.00
	3	27.01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dipelekan (Laporan)	1	1	1	100.00	1	1	100.00
	3	27.01	1.9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	1	1	1	100.00			
	3	27.01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya (Unit)	7	7	7	100.00			
					Jumlah Laporan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya (Laporan)					1	1	100.00	

Pada tahun 2024, secara umum Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah telah dapat memenuhi target program dan kegiatan yang telah ditetapkan, sedangkan untuk pencapaian target Tahun 2026 juga diproyeksikan akan memenuhi target. Pencapaian target indikator kinerja program dan kegiatan tersebut, diindikasikan akan berdampak positif terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dianalisis melalui tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran dan target Renstra 2021 - 2026. Namun, sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, bahwa penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah disajikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2020 – 2024.

Hal tersebut mengakibatkan terdapat beberapa indikator yang tidak bisa diperbandingkan secara tahunan karena tidak menjadi indikator pada tahun – tahun tertentu. seperti pada tahun 2020 yang masih berdasarkan pada Renstra 2026 – 2021, sehingga hanya indikator populasi ternak dan produktivitas komoditi unggulan perkebunan yang memiliki target. Sedangkan untuk indikator Indeks Reformasi Birokrasi hanya menjadi indikator pada tahun 2023, karena indikator tersebut

ditambahkan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, sehingga tidak memiliki data pembandingan pada tahun sebelumnya dan tidak memiliki data target pada tahun 2024 . Data pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 - 2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Kontribusi Terhadap PDRB (ADHB) (Persen)																		
	- Sub Sektor Perkebunan					8,85	8,86	8,25	8,88	8,75	8,14	7,03	6,94	7,26		92,03	79,35	84,12	81,76
	- Sub Sektor Peternakan					1,89	1,90	1,51	1,92	1,67	1,46	1,25	1,27	1,27		77,14	65,79	84,11	66,15
2	Nilai Tukar Petani (NTP)																		
	- Sub Sektor Perkebunan				88,18	88,83	101,41	101,66	101,91	93,49	107,93	103,37	111,19	133,65	106,02	121,50	101,93	109,37	131,15
	- Sub Sektor Peternakan				104,00	105,00	99,00	99,75	100,50	96,35	97,98	100,51	103,36	104,33	92,64	93,31	101,53	103,62	103,81
3	Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan (Kg/Ha)																		
	- Kelapa Dalam				1.267	1.188	1.211	1.195	1.161	1.201	1.187	1.195	1.202	1.155	94,79	99,92	98,68	100,59	99,48
	- Cengkeh				486	409	450	420	446	371	394	398	416	420	76,35	96,33	88,44	99,05	94,17
	- Kopi				1.163	604	607	609	619	583	602	644	661	536	50,15	99,67	106,10	108,54	86,59
	- Kakao				1.065	695	745	700	713	688	692	708	729	707	64,80	99,57	95,03	104,14	99,16
	- Pala				265	255	255	170	158	194	239	220	175	151	73,39	93,73	86,27	102,94	95,57
	- Kelapa Sawit				1.710	2.857	2.858	2.860	3.584	3325	3312	3.405	3.529	3.487	89,63	115,93	119,14	123,39	97,29
4	Populasi Ternak Sapi (Ekor)				394.630	424.630	468.796	491.743	546.803	369.224	402.191	431.339	461.563	207.356	93,56	94,72	92,01	93,86	37,92
5	Cakupan Bina Kelompok Tani (Persen)																		
	- Perkebunan					53,68	59,00	64,69	70,76	47,89	53,68	59,81	70,23	79,14		100,00	101,37	108,56	111,84
	- Peternakan					34,45	40,51	46,38	52,86	32,97	34,45	38,49	50,21	58,54		100,00	95,01	108,26	110,75
6	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)							64,00				81,26	58,67	69,20				91,67	
	Rata - Rata Kinerja														82,35	98,76	94,67	101,59	93,51

Sumber : Renstra Disbunnak 2025-2029.

Dari Tabel diatas dapat dianalisa sebagai berikut:

Berdasarkan data pada Tabel 2.5 dapat dilihat bahwa indikator kinerja pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Kontribusi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan terhadap PDRB; NTP Sektor Perkebunan dan Peternakan; Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan; Populasi Ternak Sapi; Cakupan Bina Kelompok Tani Perkebunan Peternakan, dan Indeks Reformasi Birokrasi. Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dikategorikan baik, sebagaimana ditunjukkan oleh rasio capaian kinerja rata – rata dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yang konsisten melampaui >93%, sedangkan khusus untuk tahun 2020 mencapai 82,35% karena perbedaan sasaran pada Renstra 2016 – 2021 dan Renstra 2021 – 2026. Dimana berdasarkan data dalam LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2020, capaian kinerja rata – rata Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah berhasil mencapai nilai 117,43% berdasarkan indikator pada Renstra 2021 - 2026 . Adapun analisis capaian kinerja pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah untuk tiap indikator kinerja, sebagai berikut:

1. Indikator Kontribusi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan terhadap PDRB menunjukkan tren realisasi capaian yang cenderung menurun pada tahun 2020 – 2023 untuk sub sektor perkebunan, kemudian mulai menunjukkan peningkatan pada tahun 2024. Sedangkan untuk kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB cenderung menurun pada tahun 2020 – 2022, kemudian menunjukkan peningkatan pada tahun 2023 – 2024. Berdasarkan Berita Resmi Statistik oleh BPS yang dirilis pada 5 Februari 2025, dengan judul Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah Triwulan IV-2025 bahwa Ekonomi Sulawesi Tengah Tahun

2024 mengalami pertumbuhan, termasuk pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Dimana struktur perekonomian Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap menjadi salah satu lapangan usaha utama yang menopang perekonomian Sulawesi Tengah, yaitu menempati posisi kedua setelah Industri Pengolahan. Pada tahun 2024, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berkontribusi sebesar 15,80% terhadap total PDRB Sulawesi Tengah. Dari kontribusi tersebut, sub sektor perkebunan dan peternakan memberikan andil 8,53%, hal ini menegaskan bahwa sub sektor perkebunan dan peternakan memiliki peranan yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus mencerminkan pentingnya penguatan kebijakan pengembangan sub sektor perkebunan dan peternakan untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah.

2. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan menunjukkan tren realisasi yang konsisten meningkat dalam 5 tahun terakhir, hal tersebut menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan petani di Sulawesi Tengah. NTP Sub Sektor Perkebunan telah berhasil mencapai nilai >100 sejak tahun 2021, dan NTP Sub Sektor Peternakan sejak tahun 2022 yang berarti bahwa daya beli petani tanaman perkebunan dan peternakan telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh indeks harga yang diterima petani (penjualan hasil produksi) memiliki kenaikan yang lebih cepat dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar petani (keperluan produksi dan konsumsi rumah tangga).

3. Indikator Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan selama periode 2021 – 2024 secara rata – rata menunjukkan rasio capaian yang sangat tinggi (>95%) yang mencerminkan tingkat realisasi kinerja yang sangat baik dan konsisten terhadap target yang telah ditetapkan. Capaian ini sekaligus mengindikasikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan telah memberikan dampak positif yang nyata terhadap petani di Sulawesi Tengah. Meskipun secara umum produktivitas komoditi unggulan perkebunan pada tahun 2024 (data angka tetap tahun 2023) cenderung menurun dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya yang disebabkan oleh perbedaan data produktivitas perkebunan setelah Sensus Pertanian 2023 (ST2023) karena adanya koreksi luas areal dan produksi secara nasional. Peningkatan produktivitas komoditi unggulan Sulawesi Tengah hanya terjadi pada komoditi cengkeh. Sebelum ST2023, luas areal perkebunan banyak mengandalkan proyeksi tahunan dari laporan administratif dinas perkebunan atau perkiraan berbasis survei sampel secara nasional, yang bisa menyebabkan overestimasi (laporan lebih besar dari kenyataan) atau underestimasi (luas/produksi tidak dilaporkan). Setelah ST2023, dengan pencacahan lengkap, BPS menemukan koreksi signifikan pada beberapa komoditas, sehingga data produktivitas komoditi unggulan perkebunan secara nasional terkoreksi mengikuti ST2023, termasuk data produktivitas komoditi unggulan perkebunan Sulawesi Tengah.
4. Indikator Kinerja Populasi Ternak menunjukkan rasio capaian >92% sepanjang tahun 2020 – 2023, namun pada tahun 2024 capaian Populasi Ternak sapi di Sulawesi Tengah hanya mencapai 37,92% atau sebanyak 207.356 ekor (data angka tetap tahun 2023). Hal ini disebabkan oleh perbedaan metode perhitungan

populasi ternak menurut BPS dan Kementerian Pertanian (Kementan). Angka populasi sapi potong yang lebih tinggi oleh Kementan (sebelum ST2023) didasarkan pada estimasi/perhitungan administratif/proyeksi, dan belum dikoreksi oleh hasil pencacahan sensus. Sebaliknya, angka BPS setelah ST2023 menunjukkan koreksi signifikan ke bawah. Perbedaan ini mencerminkan efek dari metode verifikasi dan pencacahan yang dilakukan oleh BPS dalam sensus: stok, pemotongan, kematian, dan faktor lainnya diperhitungkan nyata sehingga data yang tercatat lebih akurat tapi bisa jauh berbeda dari estimasi sebelumnya yang telah dilakukan oleh Kementan. Dalam publikasi Outlook Komoditas Daging Sapi 2023 (Pusat Data & Sistem Informasi Pertanian, Kementan) disebutkan bahwa populasi sapi potong nasional selama periode lima tahun terakhir (2018-2022) adalah sekitar 17,61 juta ekor (data angka tetap tahun 2022). Namun untuk tahun 2023, Kementan/Outlook mengakui bahwa populasi sapi potong nasional terkoreksi (menurun) mengikuti hasil Sensus Pertanian BPS, termasuk data populasi ternak di Sulawesi Tengah. Sehingga ke depannya, data populasi ternak setelah ST2023 akan konsisten antara BPS dan Kementan, yaitu menggunakan angka sensus yang diverifikasi.

5. Indikator Capaian Bina Kelompok Tani Perkebunan dan Peternakan menunjukkan rasio capaian >104% secara rata – rata sepanjang tahun 2020 – 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan pada kelompok tani telah berhasil melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Peningkatan cakupan bina kelompok perkebunan dan peternakan diharapkan memberikan dampak positif pada peningkatan kapasitas kelompok tani, sehingga berkontribusi terhadap

peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan sektor perkebunan dan peternakan.

6. Indikator Indeks Reformasi Birokrasi (RB) menunjukkan rasio capaian yang baik pada tahun 2023 yaitu 91,67% dari target, dengan nilai 58,67 (kategori CC). Kemudian pada tahun 2024 Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah melakukan berbagai perbaikan dalam pelaksanaan RB dan pelayanan publik, sehingga berhasil naik ke kategori B dengan nilai 69,20. Meskipun Indeks RB hanya menjadi indikator kinerja pada tahun 2023, namun Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki komitmen yang tinggi dalam meningkatkan Indeks RB yang akan menunjukkan tingkat keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi tiap tahunnya. Karena Indeks RB yang tinggi menandakan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang lebih efektif, dan birokrasi yang lebih bersih serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Gambaran kinerja pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah juga dapat dilihat dari pengelolaan pendanaan pelayanan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Adapun alokasi dan realisasi APBD pada periode 2020 – 2024 dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 - 2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH	850.000.000,00	1.100.000.000,00	1.000.000.000,00	950.000.000,00	686.000.000,00	1.098.788.000,00	1.345.878.600,00	1.012.361.850,00	764.182.500,00	1.468.602.669,00	129,27	122,35	101,24	80,44	214,08	3,12	16,34
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	850.000.000,00	1.100.000.000,00	1.000.000.000,00	950.000.000,00	686.000.000,00	1.098.788.000,00	1.345.878.600,00	1.012.361.850,00	764.182.500,00	1.468.602.669,00	129,27	122,35	101,24	80,44	214,08	3,12	16,34
- Retribusi Daerah	850.000.000,00	1.100.000.000,00	1.000.000.000,00	950.000.000,00	686.000.000,00	1.098.788.000,00	1.345.878.600,00	1.012.361.850,00	764.182.500,00	1.408.666.050,00	129,27	122,35	101,24	80,44	205,34	3,12	14,38
- Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.936.619,00	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA DAERAH	71.349.816.400,95	97.783.327.004,00	121.989.138.315,00	131.791.223.898,00	125.609.847.967,52	69.505.304.472,00	90.489.376.375,00	115.383.416.466,69	120.747.598.411,21	115.260.413.154,41	97,41	92,54	94,58	91,62	91,76	16,29	14,45
Belanja Operasi	61.965.348.088,95	86.906.948.760,00	119.561.853.913,00	123.727.865.300,00	123.871.569.139,26	65.351.584.639,00	80.589.748.618,00	113.005.971.583,79	113.715.509.784,21	113.528.149.984,26	105,46	92,73	94,52	91,91	91,65	20,36	16,00
- Belanja Pegawai	25.805.581.274,70	26.577.333.429,00	24.494.579.565,00	26.642.252.551,00	26.909.931.233,76	29.321.386.103,00	22.705.371.294,00	21.515.170.094,00	21.132.959.886,00	20.816.222.146,00	113,62	85,43	87,84	79,32	77,36	1,23	7,77
- Belanja Barang dan Jasa	36.159.766.814,25	60.329.615.331,00	95.067.274.348,00	54.674.887.339,00	96.961.637.905,50	36.030.198.536,00	57.884.377.324,00	91.490.801.489,79	52.085.977.730,81	92.711.927.838,26	99,64	95,95	96,24	95,26	95,62	39,82	38,41
- Belanja Hibah	-	-	-	21.792.157.920,00	-	-	-	-	19.979.231.228,00	-	-	-	-	91,68	-	-	-
- Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	20.618.567.490,00	-	-	-	-	20.517.340.939,40	-	-	-	-	99,51	-	-	-
Belanja Modal	9.384.468.312,00	10.876.378.244,00	2.427.284.402,00	8.063.358.598,00	1.738.278.828,26	4.153.719.833,00	9.899.627.757,00	2.377.444.882,90	7.032.088.627,00	1.732.263.170,15	44,26	91,02	97,95	87,21	99,65	22,99	45,69
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.225.400.000,00	3.448.112.683,00	1.798.137.902,00	6.063.358.598,00	748.390.004,26	1.386.911.560,00	3.361.998.175,00	1.748.925.300,00	5.432.088.627,00	744.894.000,00	26,54	97,50	97,26	89,59	99,53	16,92	54,68
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.159.068.312,00	6.739.265.561,00	280.146.500,00	2.000.000.000,00	989.888.824,00	1.935.174.253,00	5.850.274.582,00	279.799.582,90	1.600.000.000,00	987.369.170,15	46,53	86,81	99,88	80,00	99,75	132,40	135,16
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	689.000.000,00	180.000.000,00	-	-	831.634.020,00	687.355.000,00	179.820.000,00	-	-	-	99,76	99,90	-	-	-	-
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	169.000.000,00	-	-	-	-	168.900.000,00	-	-	-	-	99,94	-	-	-	-
TOTAL	70.499.816.400,95	96.683.327.004,00	120.989.138.315,00	130.841.223.898,00	124.923.847.967,52	68.406.516.472,00	89.143.497.775,00	114.371.054.616,69	119.983.415.911,21	113.791.810.485,41	97,03	92,20	94,53	91,70	91,09	16,47	14,59

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas perkebunan dan peternakan provinsi sulawesi tengah pada tahun 2026 yaitu sebagai berikut :

1. Penataan kembali (rearrange) tugas dan fungsi struktur organisasi pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
2. Penajaman penganggaran program dan kegiatan dengan skala prioritas dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
3. Pengoptimalan peran penyuluh Perkebunan dan Peternakan dalam penentuan dan pendampingan kelompok penerima bantuan
4. Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi intensif terhadap anggaran yang bersumber dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD

Berdasarkan tugas dan fungsinya dalam pencapaian target yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029, masih terdapat permasalahan spesifik yang menghambat pencapaian kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi sebagai berikut :

Masalah Utama	Masalah	Faktor Penghambat
Hilirisasi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan Belum Optimal	• Hasil dari tanaman perkebunan (kakao, kelapa, kopi, cengkeh) masih dijual dalam bentuk bahan mentah • Hasil dari ternak seperti daging dan telur belum banyak diolah menjadi produk bernilai tambah	• Terbatasnya unit pengolahan hasil (UPH) di tingkat kelompok • Investasi hilir masih rendah • Kurangnya akses terhadap sarana dan prasarana pengolahan hasil
	• Rendahnya kualitas SDM dalam pengolahan pascapanen dan manajemen usaha perkebunan dan peternakan	• Minimnya pelatihan teknologi pengolahan dan standar mutu produk perkebunan dan peternakan • Lemahnya peran kelembagaan petani-peternak dalam bisnis hilir
	• Akses pasar produk olahan perkebunan dan peternakan yang masih terbatas	• Rantai distribusi panjang dan tidak efisien • Belum optimalnya pelaksanaan promosi, <i>branding</i>, dan standarisasi produk perkebunan dan peternakan (sertifikasi halal, NKV, mutu pangan]

Masalah Utama	Masalah	Faktor Penghambat
	• Daya saing produk olahan perkebunan dan peternakan masih rendah	• Persaingan dengan produk luar daerah yang lebih kompetitif • Terbatasnya akses pembiayaan untuk usaha pengolahan dan pemasaran
Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan masih perlu ditingkatkan	• Ketergantungan pada pola usaha monokultur	• Lemahnya diversifikasi usaha tani perkebunan (tidak adanya integrasi perkebunan - peternakan)
	• Produksi dan produktivitas komoditas unggulan perkebunan belum optimal	• Masih luasnya areal tanaman perkebunan yang sudah tua/rusak • Keterbatasan akses terhadap pupuk, pestisida dan alat dan mesin pertanian modern • Pengetahuan dan keterampilan petani perkebunan terkait manajemen budidaya yang relatif masih rendah • Benih/bibit unggul perkebunan belum tersebar merata/belum digunakan secara optimal • Pencegahan dan penanggulangan hama penyakit yang belum dilaksanakan secara terpadu • Keterbatasan jumlah SDM teknis bidang perkebunan (Petugas pengamat Hama dan Penyakit Tanaman, Pengawas Bibit Tanaman Perkebunan, serta Penyuluh Pertanian)
Populasi dan produksi hasil peternakan masih perlu ditingkatkan guna mewujudkan swasembada daging	• Peningkatan Populasi ternak dan Produktivitas ternak belum optimal	• Tingkat kelahiran ternak rendah akibat manajemen reproduksi yang belum optimal • Pengawasan pemotongan betina produktif yang

Masalah Utama	Masalah	Faktor Penghambat
		belum optimal • Ketersediaan bibit ternak unggul terbatas • Masih rendahnya manajemen penggemukan di tingkat peternak • Pengetahuan dan keterampilan peternak terkait manajemen budidaya yang relatif masih rendah • Penerapan teknologi pakan yang masih rendah • Terbatasnya pelayanan kesehatan hewan dan vaksinasi • Lemahnya sistem biosekuriti pada peternakan rakyat

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka serta perencanaan dan penganggaran terpadu; kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan urusan wajib yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

Dokumen RKPD ini merupakan sub sistem penting sebagai input dalam penyusunan program dan penganggaran OPD. Dokumen RKPD ini merupakan dokumen publik, sehingga melibatkan semua *stakeholders* dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi pengaruh utama (*mainstreaming*) dalam proses penyusunan dokumen ini. Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen RKPD ini dapat diakses oleh semua *stakeholders* baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Pagu indikatif pada RKPD disusun berdasarkan pagu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan proyeksi atau perkiraan selama 5 tahun, namun pada dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 pagu indikatif untuk Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah adalah senilai Rp. 101.780.135.960,-

**Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Provinsi Sulawesi Tengah**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS PERKUBUNAN DAN PETERNAKAN				10,760,135,900.43	DINAS PERKUBUNAN DAN PETERNAKAN				101,762,289,900.43	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				38,757,385,270.43	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				38,757,385,270.43	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAPK Dinas Perkebunan dan Peternakan	85 Nilai	1,386,373,050.30	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAPK Dinas Perkebunan dan Peternakan	85 Nilai	1,386,373,050.30	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	333,240,900.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	333,240,900.00	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	1,038,862,000.30	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	1,038,862,000.30	
3	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Perkebunan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	12,650,000.00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	12,650,000.00	
4	Penyenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1,620,150.00	Penyenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1,620,150.00	
II	Administrasi Keuangan Daerah		TUHP BPK dan APK Dinas Perkebunan dan Peternakan	3 Dokumen	30,350,294,899.13	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		TUHP BPK dan APK Dinas Perkebunan dan Peternakan	3 Dokumen	30,350,294,899.13	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	903 Orang/Bulan	30,281,244,899.13	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	903 Orang/Bulan	30,281,244,899.13	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	0	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	8,700,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	8,700,000.00	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	51,600,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	51,600,000.00	
5	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	8,750,000.00	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	8,750,000.00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	0,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	0	

7	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	52.449.850,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	52.449.850,00
8	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	9.999.850,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	9.999.850,00
III	Barang Milik Daerah pada SKPD				-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				377.390,000
1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Paki, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	377.390,000
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	42.450.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	42.450.000,00
3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				9.550.000,00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				9.550.000,00
4	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	9.550.000,00	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	9.550.000,00
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Profesional ASN Dinas Perkebunan dan Peternakan	68 Indeks	233.320.200,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Profesional ASN Dinas Perkebunan dan Peternakan	68 Indeks	233.320.200,00
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	230.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	230.000,00
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Paki, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Paki, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	0
3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	155.987.700,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	155.987.700,00
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Paki, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	415 Orang	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Paki, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	415 Orang	0
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	77.102.500,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	77.102.500,00
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	1 Laporan	280.311.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	1 Laporan	280.311.000,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Paki, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Paki, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Paki, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Paki, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0

3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	225,136,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	225,136,000.00	
4	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	175,000.00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	175,000.00	
5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	55,000,000.00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	55,000,000.00	
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				49,683,800.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				49,683,800.00	
1	Pengadaan Mebel	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0	Pengadaan Mebel	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	48 Unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	48 Unit	0	
3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	49,683,800.00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	49,683,800.00	
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Digitalisasi Arsip Dinas Perkebunan dan Peternakan	62 Indeks	5,454,264,311.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Digitalisasi Arsip Dinas Perkebunan dan Peternakan	62 Indeks	5,454,264,311.00	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	0	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5,454,264,311.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5,454,264,311.00	
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	940,938,160.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	940,938,160.00	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0	

2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu, Palu Timur, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	200 Unit	249,988,100.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu, Palu Timur, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	200 Unit	249,988,100.00	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu, Palu Timur, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	424 Unit	690,950,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu, Palu Timur, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	424 Unit	690,950,000.00	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu, Palu Timur, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu, Palu Timur, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	0	
B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				61,681,000,640.00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				61,681,000,640.00	
1	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		luas Areal Intensifikasi	3820 Ha	11,181,833,340.00	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		luas Areal Intensifikasi	3820 Ha	11,181,833,340.00	
1	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	11,181,833,340.00	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	11,181,833,340.00	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	0	
B	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah Bibit Komoditas Unggulan Perkebunan yang Digunakan dalam Kegiatan Peremajaan	715650 Pokon	21,916,873,000.00	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah Bibit Komoditas Unggulan Perkebunan yang Digunakan dalam Kegiatan Peremajaan	715650 Pokon	21,916,873,000.00	
1	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 5	1 Laporan	21,916,873,000.00	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 5	1 Laporan	21,916,873,000.00	
B	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		Persentase Peningkatan Populasi Ternak Sapi, Kambing, dan Babi Populasi Ternak (Sapi : 2318521, Kambing : 116230, Babi : 131585, Ayam Ras Petelur : 1617894, Ayam Ras Pedaging : 1536077, Ayam Ras Pedaging : 9927372, itik : 103425)	5,5 % 13852484 ekor	28,582,294,300.00	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		Persentase Peningkatan Populasi Ternak Sapi, Kambing, dan Babi Populasi Ternak (Sapi : 2318521, Kambing : 116230, Babi : 131585, Ayam Ras Petelur : 1617894, Ayam Ras Pedaging : 1536077, Ayam Ras Pedaging : 9927372, itik : 103425)	5,5 % 13852484 ekor	28,582,294,300.00	
1	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah benih/bibit ternak dan Hewan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	28,582,294,300.00	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah benih/bibit ternak dan Hewan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	28,582,294,300.00	
C	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				473,000,100.00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				473,000,100.00	

D	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah Laporan Pengawasan Prasarana Pertanian di Kabupaten/Kota Persentase Pemenuhan Prasarana Perkebunan	1 Laporan 50 %	473,000,100.00	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah Laporan Pengawasan Prasarana Pertanian di Kabupaten/Kota Persentase Pemenuhan Prasarana Perkebunan	1 Laporan 50 %	473,000,100.00	
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	100,000,100.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	100,000,100.00	
1	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	95,999,900.00	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	95,999,900.00	
2	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	273,000,000.00	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	273,000,000.00	
D	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				595,999,900.00	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				595,999,900.00	
1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Menular/Zoonosis	52%	400,000,000.00	Penjaminan kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Menular/Zoonosis	52%	400,000,000.00	
1	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	400,000,000.00	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	400,000,000.00	
B	Pengawasan Pemusukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi		Persentase Unit Usaha Produk Peternakan yang Dibina Persentase Unit Usaha yang Memapkan Higiese Sanitasi pada proses produksi atau Memiliki Sertifikat Nomor Kontrol	100%	195,999,900.00	Pengawasan Pemusukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi		Persentase Unit Usaha Produk Peternakan yang Dibina Persentase Unit Usaha yang Memapkan Higiese Sanitasi pada proses produksi atau Memiliki Sertifikat Nomor Kontrol	100%	195,999,900.00	
1	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	1 Laporan	195,999,900.00	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	1 Laporan	195,999,900.00	
E	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				200,000,000.00	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				200,000,000.00	

0	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Persentase Luas Areal Pengendalian Serangan (OPT) Perkebunan	100 Ha 100 %	200,000,000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Persentase Luas Areal Pengendalian Serangan (OPT) Perkebunan	100 Ha 100 %	200,000,000	
1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	3795 Ha	100,000,000.00	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	3795 Ha	100,000,000.00	
2	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3000 Ha	100,000,000.00	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3000 Ha	100,000,000.00	
0	PROGRAM PERUMAHAN USAHA PERTANIAN				0	PROGRAM PERUMAHAN USAHA PERTANIAN				0	
0	Pemberitaan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Usaha Perkebunan yang Memenuhi Standar Izin usaha	20%	0	Pemberitaan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Usaha Perkebunan yang Memenuhi Standar Izin usaha	20%	0	
1	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	
2	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian		Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	0	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian		Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	0	
0	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				50,000,050.00	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				50,000,050.00	
0	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Persentase Kelompok Perkebunan dan Peternakan yang Naik Kelas Persentase kelompok perkebunan dan peternakan yang sudah menerapkan teknologi	10 % 12,5 %	50,000,050	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Persentase Kelompok Perkebunan dan Peternakan yang Naik Kelas Persentase kelompok perkebunan dan peternakan yang sudah menerapkan teknologi	10 % 12,5 %	50,000,050	
1	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	160 Kelompok	50,000,050.00	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	160 Kelompok	50,000,050.00	
	NON URUSAN				18,950,000.00	NON URUSAN				18,950,000.00	
0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN				18,950,000.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN				18,950,000.00	
0	Administrasi Barang Milik Daerah pada		Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada	1 Laporan	18,950,000.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada		Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada	1 Laporan	18,950,000.00	
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	18,950,000.00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	18,950,000.00	
	UPTD PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN				500,000,000.00	UPTD PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN				500,000,000.00	

6	PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				105.504.030.00	PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				105.504.030.00
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.000.000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.000.000.00
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	2.000.000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	2.000.000.00
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah				0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah				0
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0
4	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah				15.414.030.00	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah				15.414.030.00
5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	15.414.030.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	15.414.030.00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah				84.090.000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah				84.090.000.00
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	0
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah				84.090.000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah				84.090.000.00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	0
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	84.090.000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	84.090.000.00
8	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				354.495.990.00	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				354.495.990.00
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Jumlah luas serangan OPT yang hilang/memfaatkan APH pada tanaman kelapa, cengkeh dan kakao	300 Ha	354.495.990.00	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Jumlah luas serangan OPT yang hilang/memfaatkan APH pada tanaman kelapa, cengkeh dan kakao	300 Ha	354.495.990.00
1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang	1500 Ha	354.495.990.00	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang	1500 Ha	354.495.990.00
	UPTD PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN				400.352.572.00	UPTD PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN				400.352.572.00

2	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran & tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	150,159,620.00	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran & tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	150,159,620.00
UPT PEMBIKITAN TERNAK						UPT PEMBIKITAN TERNAK				
PROGRAM PENUNJANG						PROGRAM PENUNJANG				
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah				52,900,765.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah				52,900,765.00
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40,784,815.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40,784,815.00
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12,115,950.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12,115,950.00
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				111,112,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				111,112,000.00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	111,112,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	111,112,000.00
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0
11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				129,330,450.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				129,330,450.00
1	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	22 Unit	61,350,450.00	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	22 Unit	61,350,450.00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	47,785,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	47,785,000.00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
5	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Produksi straw semen beku ternak	40000 straw	806,451,600.00	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Produksi straw semen beku ternak	40000 straw	806,451,600.00

5	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				740,007,864.00	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				740,007,864.00	
6	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase pangan asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	76%		6	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase pangan asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	76%	0
1	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	1 Laporan		0	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	1 Laporan	0
2	Pengawasan Pemusukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi					0	Pengawasan Pemusukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi				0
	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	1 Laporan		0	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	1 Laporan	0
	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		Persentase jumlah sampel hewan ternak sesuai standar hasil uji	100%	-440,068,800.00		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		Persentase jumlah sampel hewan ternak sesuai standar hasil uji	100%	-440,068,800.00
	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	3 Unit	-440,068,800.00		Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	3 Unit	-440,068,800.00
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen		0	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	0
8	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase pangan asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	76%	295,995,064.00		Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase pangan asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	76%	295,995,064.00
1	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemusukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SSKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Pemusukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SSKH/SKPH HPM	3 Dokumen	295,995,064.00		Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemusukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SSKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Pemusukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SSKH/SKPH HPM	3 Dokumen	295,995,064.00
UPT BALAI PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN					-409,999,990.00	UPT BALAI PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN					-409,999,990.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					150,000,800.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					150,000,800.00
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah				14,003,350.00		Administrasi Umum Perangkat Daerah				14,003,350.00

1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	54,033,350.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	54,033,350.00	
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0	
3	Pengadaan Mebel	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0	Pengadaan Mebel	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0	
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0	
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25,324,320.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25,324,320.00	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	25,324,320.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	25,324,320.00	
2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				70,702,200.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				70,702,200.00	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	10 Unit	70,702,200.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	10 Unit	70,702,200.00	
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	0	
8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENDERIVASI SARANA PERTANIAN				349,960,120.00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENDERIVASI SARANA PERTANIAN				349,960,120.00	
1	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Penedaran Benih Tanaman		Protokol benih tanaman perkebunan dan kebun sumber benih (CSB) kewilayahan Dinas	1084000 Benih	349,960,120.00	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Penedaran Benih Tanaman		Protokol benih tanaman perkebunan dan kebun sumber benih (CSB) kewilayahan Dinas	1084000 Benih	349,960,120.00	
1	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	1000 Mata	0	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	1000 Mata	0	
2	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	1000 Setek	0	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	1000 Setek	0	
	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	1000 Gram	0	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	1000 Gram	0	
	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	10000 Batang	0	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	10000 Batang	0	

Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan		Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran di tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	349,960,130,00	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan		Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran di tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	349,960,130,00	
JUMLAH				14,375,488,301	JUMLAH				105,354,538,301	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program/Kegiatan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah selain bersumber dari hasil penelaahan isu-isu strategis (teknokratis) juga berasal dari usulan para pemangku kepentingan, dalam hal ini Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD (politis). Selain itu juga ada usulan dari Dinas yang membidangi urusan perkebunan dan urusan peternakan di Kabupaten/Kota yang disampaikan dalam Lintas Forum OPD yang masuk untuk Renja 2026 yang telah terinput dalam Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) Provinsi Sulawesi Tengah dapat terlihat pada tabel berikut

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Forum Organisasi Daerah Tahun 2026
Provinsi Sulawesi Tengah

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan (Kelapa Dalam, Cengkeh, Kopi, Kakao, Pala, Kelapa Sawit)		
		Kelahiran Ternak Sapi Hasil Inseminasi Buatan (IB) dan Kawin Alam (KA)		
Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Persentase Ketersediaan Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Perkebunan		
<i>Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana pendukung Pertanian</i>		Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian		
• Permohonan Bantuan Mesin Paras	Kabupaten Banggai		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Hand Traktor	Kota Palu		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Hand Traktor	Kabupaten Buol		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Hand Traktor	Kabupaten Buol		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Hand Sprayer	Kabupaten Toli-toli		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Mesin Parut Kelapa	Kabupaten Banggai Kepulauan		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Mesin Paras	Kabupaten Parigi Moutong		1 Kelompok	
• Permohonan Alat Pembuatan pupuk Organik	Kabupaten Parigi Moutong		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Hand Sprayer	Kabupaten Parigi Moutong		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Mesin Paras dan Hand Sprayer	Kabupaten Parigi Moutong		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Hand Traktor	Kabupaten Parigi Moutong		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Mesin Paras	Kabupaten Parigi Moutong		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Mesin Paras dan Hand sprayer	Kabupaten Parigi Moutong		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Hand Sprayer	Kabupaten Poso		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Mesin Paras	Kabupaten Poso		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Hand Sprayer, Drum Air, Herbisida, dan Pupuk	Kabupaten Donggala		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Pupuk Cair (POC)	Kabupaten Donggala		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Pupuk Cair (POC)	Kabupaten Sigi		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Pupuk	Kabupaten Donggala		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Pupuk	Kabupaten Sigi		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Excavator PC. 75	Kabupaten Morowali Utara		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Mesin Paras	Kabupaten Morowali Utara		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Mesin Paras	Kabupaten Morowali Utara		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Mesin Paras	Kabupaten Morowali Utara		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Mesin Paras	Kabupaten Morowali Utara		1 Kelompok	

• Permohonan Bantuan Pupuk Organik Padat (POP) dan Pupuk Organik Cair (POC)	Kabupaten Toli-toli		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Pupuk NPK	Kabupaten Toli-toli		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Hand Sprayer	Kabupaten Toli-toli		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Mesin Cultivator	Kabupaten Toli-toli		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Alat Perontok Jagung	Kabupaten Toli-toli		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Mesin Paras	Kabupaten Banggai Laut		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Mesin Paras	Kabupaten Banggai		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Mesin Paras	Kabupaten Banggai Laut		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Pupuk NPK	Kabupaten Banggai		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Pupuk Cair (POC)	Kabupaten Banggai Laut		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Gerobak Arto	Kabupaten Banggai Kepulauan		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Gerobak Arto	Kabupaten Banggai Kepulauan		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Gerobak Arto	Kabupaten Banggai Kepulauan		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Gerobak Arto	Kabupaten Banggai Kepulauan		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Hand Sprayer	Kabupaten Banggai		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Hand Sprayer	Kabupaten Banggai		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Hand Sprayer	Kabupaten Banggai		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Mesin Paras	Kabupaten Banggai Kepulauan		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Mesin Paras	Kabupaten Banggai		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Penampungan Air	Kabupaten Banggai Kepulauan		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Mesin Parut Listrik	Kabupaten Banggai Kepulauan		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Gerobak Arto	Kabupaten Banggai Kepulauan		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Mesin Paras	Kabupaten Banggai Kepulauan		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Mesin Paras dan Chainsaw Stihl Mini	Kabupaten Banggai		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Gerobak Arto	Kabupaten Banggai Kepulauan		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Hand Sprayer Elektrik	Kabupaten Donggala		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Cultivator	Kabupaten Banggai		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Chainsaw Stihl Mini	Kabupaten Morowali		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Mesin Paras	Kabupaten Toli-toli		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Mesin Paras	Kabupaten Toli-toli		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Mesin Paras	Kabupaten Toli-toli		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Hand Sprayer	Kabupaten Toli-toli		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Hand Sprayer	Kabupaten Toli-toli		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Mesin Paras	Kabupaten Toli-toli		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Mesin Paras	Kabupaten Toli-toli		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Hand Sprayer	Kabupaten Toli-toli		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Hand Sprayer	Kabupaten Toli-toli		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Hand Sprayer	Kabupaten Toli-toli		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Hand Sprayer	Kabupaten Toli-toli		1 Kelompok	
•			1 Kelompok	

Bantuan Bibit Kelapa Sawit	Kabupaten Banggai			
Bantuan Bibik Kakao Sambung Pucuk 45	Kabupaten Banggai			
Bantuan Bibik Kakao Sambung Pucuk 45	Kabupaten Banggai			
Bantuan Bibik Kakao Sambung Pucuk 45	Kabupaten Donggala			
Bantuan Bibit Kelapa Sawit	Kabupaten Morowali Utara			
Bantuan Bibit Kelapa Sawit	Kabupaten Morowali Utara			
Bantuan Bibik Kakao Sambung Pucuk 45	Kabupaten Poso			
Bantuan Bibik Kakao Sambung Pucuk 45	Kabupaten Banggai			
Bantuan Bibik Kakao Sambung Pucuk 45	Kabupaten Poso			
Bantuan Bibik Kakao Sambung Pucuk 45	Kabupaten Poso			
Bantuan Bibik Kakao Sambung Pucuk 45	Kabupaten Poso			
Bantuan Bibik Kakao Sambung Pucuk 45	Kabupaten Poso			
Bantuan Bibik Kakao Sambung Pucuk 45	Kabupaten Morowali Utara			
Bantuan Bibik Kakao Sambung Pucuk 45	Kabupaten Toli-toli			
Bantuan Bibik Kakao Sambung Pucuk 45	Kabupaten Toli-toli			
Bantuan Bibik Kakao Sambung Pucuk 45	Kabupaten Toli-toli			
Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman		Akseptor Ternak Sapi		
<i>Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak</i>		<i>Jumlah Ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang diproduksi</i>		
Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan-Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Mas				
• Permohonan Bantuan Ternak Sapi	Kabupaten Banggai		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Ternak Ayam Pedaging (Broiler)	Kabupaten Banggai Kepulauan		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Ternak Ayam Pedaging (Broiler)	Kabupaten Banggai Kepulauan		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Ternak Sapi Bali	Kabupaten Banggai Kepulauan		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Ternak Sapi	Kabupaten Banggai Kepulauan		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Ternak Babi	Kabupaten Banggai Kepulauan		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Ternak Babi	Kabupaten Banggai		1 Kelompok	
• Permohonan Bantuan Ternak Sapi	Kabupaten Banggai Kepulauan		1 Kelompok	
• Permohonan Pembibitan Ternak Sapi	Kabupaten Banggai		1 Kelompok	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Kementerian Pertanian, Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 Dalam pencapaian visi tersebut, ditetapkan misi Kementerian yaitu :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Petani
2. Mendorong Kemandirian Pangan Asal Pertanian
3. Meningkatkan Nilai Manfaat Produk Pertanian bagi Rakyat Indonesia
4. Mencegah dan Menangani Penularan Penyakit Hewan kepada Manusia
5. Meningkatkan Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang Berdampak Langsung kepada Masyarakat

Secara umum, Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 ini bermakna bahwa pembangunan pertanian dilanjutkan dengan serangkaian upaya strategis dalam mewujudkan pertanian yang maju sesuai perkembangan zaman. Selain itu, pembangunan pertanian juga harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh Rakyat Indonesia, sehingga dapat mewujudkan Visi Presiden dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 disusun dalam mewujudkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 serta memastikan kontribusi dalam pelaksanaan Asta Cita Presiden.

3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2026 adalah:

1. Kontribusi Subsektor Perkebunan dan Peternakan Terhadap PDRB (ADHB), yang mengukur peran subsektor perkebunan dan peternakan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.
2. Indeks Ekonomi Hijau, yang menekankan pentingnya pembangunan subsektor perkebunan dan peternakan yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan tujuan yang ada, maka sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan dan Peternak, yang diukur melalui indikator Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Perkebunan dan NTP Peternakan.
2. Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan, yang diukur melalui indikator Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan.

Adapun indikator serta target dari tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut

IKU TAHUN 2026 BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2025-2029					
NO	NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan Kontribusi PDRB (ADHB) dan Produktivitas Ekonomi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan		Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB (ADHB) (Persen)	7,46
2	Meningkatnya Daya Saing Daerah dan Produktivitas Ekonomi Sektoral			Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB (ADHB) (Persen)	1,41
			Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan dan Peternak	NTP Tanaman Perkebunan (Persen)	67,33
				NTP Peternakan (Persen)	134,75
			Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan	Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan (Ton/Ha)	105,53
				Kelapa Dalam	1,18
				Cengkeh	0,5
				Kopi	0,79
				Kakao	0,73
				Pala	0,17
				Kelapa Sawit	3,78

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Daerah menetapkan Dinas Perkebunan dan Peternakan yang merupakan penggabungan dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2018, berdasarkan Peraturan Gubernur No. 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Teknis Badan dan cabang Dinas, UPT Penyuluhan Perkebunan dan Peternakan diganti menjadi UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan sehingga Program Pengembangan SDM Perkebunan dan Peternakan serta Kelembagaan Penyuluhan hilang pada Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2018 dan Tahun 2019.

Melalui peraturan Gubernur No. 61 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 yang mengatur tentang kedudukan dan susunan organisasi daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan, maka ditetapkan perubahan yaitu : Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahi seksi kesehatan hewan; seksi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; seksi kesehatan masyarakat veteriner, Bidang Peternakan dan Penyuluhan membawahi : Seksi Produksi dan Pembibitan Ternak; Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan serta Seksi Penyuluhan.

Kepmendagri no 900.1.15.5-3406 mulai digunakan pada Tahun 2024 hal ini didasarkan bahwa program dan kegiatan saat ini belum mengacu pada UU nomor 23 tahun 2014 yang mengatur tentang kewenangan, pembagian kewenangan pusat, provinsi dan kewenangan kabupaten sehingga masih banyak kegiatan yang tumpang tindih, beragamnya Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur program, kegiatan, Organisasi, dan Akun yang digunakan pemerintah daerah juga mendasari Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah digunakan untuk mendukung system informasi Pemerintah Daerah, tetapi pada Pertengahan Agustus terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang memperbarui Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2023 sehingga Dinas Perkebunan dan Peternakan menyusun pemetaan program, kegiatan dan

sub kegiatan tahun 2026 sebagai berikut : terdapat 6 program (1 program rutin dan 5 program teknis) dengan 20 kegiatan (9 kegiatan rutin dan 11 kegiatan teknis) serta 48 sub kegiatan (27 Sub Kegiatan rutin dan 21 sub kegiatan teknis), Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- c. Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral
- d. Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- d. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
- e. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- b. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD
- c. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
- d. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah

- a. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pendataan pengelolaan administrasi kepegawaian
 - b. Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai
 - c. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- 6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
 - b. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

- 1. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
 - a. Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
- 2. Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

- a. Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan
 - b. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
 - c. Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh
 - d. Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang
- 3. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih / Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - a. Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
- 4. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih / Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - a. Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih / Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - b. Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, Serta Pakan Kewenangan Provinsi
- 3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 1. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
 - b. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
 - c. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan
 - d. Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
- 4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- a. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
 - a. Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM
 - b. Pengawasan Peredaran Produk Hewan
3. Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona / Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
 - a. Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona / Kompartemen Bebas Penyakit
4. Kegiatan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a. Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan
5. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
 - a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - b. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - c. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan
6. Program Penyuluhan Pertanian
 1. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
 - a. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Rencana kerja (Renja) dan pendanaan tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2026 dan pencapaian Misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan yaitu secara langsung mendukung Misi ke-2 Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan., yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari mengacu pada RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sehingga program prioritas Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi bisa terwujud.

Rencana program dan kegiatan secara keseluruhan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 ini dapat terlihat pada tabel 2.6 berikut:

	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2027	
KODE			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DINAS + UPT				105.375.488.314,42			90.272.531.241,96
	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN				95.505.834.361,67			82.587.976.647,85
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		77	40.590.154.630	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	81	39.830.394.569,03
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		87	398.965.562,55	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	88	310.636.285,85
		Persentase capaian IKU Perangkat Daerah (Persen)		98		Persentase capaian IKU Perangkat Daerah (Persen)	98	
		Nilai Kematangan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah (Nilai)		13,79		Nilai Kematangan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah (Nilai)	14,96	
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)		14	198.392.624,43	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	14	154.469.342,16
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		34	116.753.520,14	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	34	90.904.787,94
3.27.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		5	41.909.708,99	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	5	32.631.077,88
3.27.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1	41.909.708,89	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	1	32.631.077,88
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Tindaklanjuti Rekomendasi (THLP) BPK dan APIP (persen)		100%	30.567.173.951,93	Persentase Hasil Tindaklanjuti Rekomendasi (THLP) BPK dan APIP (persen)	100%	32.026.459.134,08
		Persentase capaian realisasi APBD Perangkat Daerah (Persen)		96%		Persentase capaian realisasi APBD Perangkat Daerah (Persen)	96%	
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)		271	30.312.661.836,03	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	271	31.828.294.916,89
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		4	181.801.022,71	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	141.551.050,42
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		10	24.237.031,06	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	10	18.871.055,59
3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		1	24.237.031,06	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	18.871.055,59
3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		1	24.237.031,06	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	18.871.055,59
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang sesuai ketentuan (Persen)		100%	209.398.643,79	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang sesuai ketentuan (Persen)	100%	163.038.675,71
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		1	56.584.156,82	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	44.056.665,44
3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik daerah pada SKPD (Laporan)		4	56.584.156,82	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik daerah pada SKPD (Laporan)	4	44.056.665,44
3.27.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		4	56.584.156,82	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	44.056.665,44
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		4	39.646.173,34	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	30.868.679,38
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi pendapatan pada perangkat daerah yang sesuai ketentuan (Persen)		100%	16.937.983,48	Persentase dokumen administrasi pendapatan pada perangkat daerah yang sesuai ketentuan (Persen)	100	13.187.986,06
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah (laporan)		4	15.000.000,00	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah (laporan)	4	13.187.986,06
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah (Indeks)		80	206.747.905,84	Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah (Indeks)	85	160.974.799,85
		Indeks reformasi hukum perangkat daerah (Indeks)		50		Indeks reformasi hukum perangkat daerah (Indeks)	60	
3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		1	65.622.038,96	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	51.093.598,97
3.27.01.1.05.0005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		1	65.622.038,96	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	51.093.598,97
3.27.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan(Orang)		100	75.503.827,91	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan(Orang)	100	58.787.601,92
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai kematangan penerapan SPBE pada perangkat daerah (Nilai)		55,71	267.352.180,12	Nilai kematangan penerapan SPBE pada perangkat daerah (Nilai)	65,71	208.161.545,86
		Nilai Kualitas pengelolaan kearsipan digital perangkat daerah (Nilai)		42		Nilai Kualitas pengelolaan kearsipan digital perangkat daerah (Nilai)	43	
		Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI (Nilai)		40		Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI (Nilai)	60	
		Persentase hasil tindaklanjuti laporan pengaduan melalui SP4N lapor (Persen)		100		Persentase hasil tindaklanjuti laporan pengaduan melalui SP4N lapor (Persen)	100	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		3	205.125.755,16	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	159.711.786,42
3.27.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	18.175.867,77	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	14.151.808,00
3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		1	44.050.557,18	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	34.297.951,00
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan pengadaan Barang/jasa pemerintah pada SPSE (Nilai)		73	91.286.769,87	Nilai Kepatuhan Pencatatan pengadaan Barang/jasa pemerintah pada SPSE (Nilai)	75	77.173.557,00
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		1	12.242.774,46	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	10.350.004,00

3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		3	79.043.995,41	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		3	66.823.553,00
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai pengukuran kualitas pelayanan publik perangkat daerah (Nilai) Nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada aplikasi SKM terintegrasi (Nilai)		75 86	7.484.820.887,32	Nilai pengukuran kualitas pelayanan publik perangkat daerah (Nilai) Nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada aplikasi SKM terintegrasi (Nilai)		75 90	5.827.713.414,38
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (laporan)		4	7.484.820.887,32	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (laporan)		4	5.827.713.414,38
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara (Persen)		100%	1.347.470.744,62	Persentase barang milik daerah yang dipelihara (Persen)		100%	1.049.146.459,50
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		214	869.153.606,67	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		214	676.726.699,14
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)		75	19.535.140,95	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)		82	15.210.143,93
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)		5	458.781.997,01	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)		5	357.209.616,44
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Populasi Ternak (Ekor)			17.881.796.095,05	Populasi Ternak (Ekor)			13.922.842.583,03
		Sapi		240.002		Sapi		248.408	
		Kambing		131.931		Kambing		149.082	
		Babi		132.243		Babi		132.904	
		Unggas		13.951.960		Unggas		14.498.324	
		Produksi Daging dan Telur (Kg)				Produksi Daging dan Telur (Kg)			
		Sapi		4.230.421		Sapi		4.315.030	
		Kambing		690.754		Kambing		704.569	
		Babi		2.118.426		Babi		2.160.795	
		Unggas		15.737.991		Unggas		16.052.751	
		Telur		24.840.531		Telur		25.088.936	
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah benih/bibit ternak yang tersedia dam diproduksi (ekor)		14.041.433	17.881.796.095,05	Jumlah benih/bibit ternak yang tersedia dam diproduksi (ekor)		14.041.433	13.922.842.583,03
		luas areal hijauan pakan ternak berkualitas (ha)		816		luas areal hijauan pakan ternak berkualitas (ha)		883	
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi (Laporan)		7	17.881.796.095,05	Jumlah Ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi (Laporan)		7	13.922.842.583,03
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan (Ton)			17.497.356.195	Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan (Ton)			13.623.516.040
		Kelapa Dalam:		214.792		Kelapa Dalam:		215.604	
		Cengkeh:		29.878		Cengkeh:		44.112	
		Kakao:		189.415		Kakao:		201.924	
		Pala:		1.494		Pala:		1.526	
		Kopi:		3.596		Kopi:		4.021	
		Kelapa Sawit:		144.398		Kelapa Sawit:			
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas Areal Peremajaan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan (Ha)		72.858	17.497.356.195	Luas Areal Peremajaan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan (Ha)		156.820	13.623.516.040
	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)		1	17.497.356.195	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)		1	13.623.516.039,61
3.27.03.1.01	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pekebun Sawit yang mendapatkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) (Persen)		60%	355.669.423,00	Persentase Pekebun Sawit yang mendapatkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) (Persen)			5.402.695.857,00
3.27.03.1.01.0009	Penataan Prasaran Pertanian	Jumlah Pekebun Sawit Rakyat yang Tervalidasi (Orang)		60	355.669.423,00	Jumlah Pekebun Sawit Rakyat yang Tervalidasi (Orang)			1.459.531.370,00
3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)		100	355.669.423,15	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)			300.681.850,00
3.27.03.1.01.0019	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Prasarana Perkebunan (Persen)		45	1.726.445.009,00	Persentase Penyediaan Prasarana Perkebunan (Persen)			1.903.736.570,00
3.27.03.1.01.0020	Penataan Prasaran Pertanian	Jumlah Kelompok Yang Terfasilitasi Prasarana Perkebunan (Kelompok)		4	1.726.445.009,00	Jumlah Kelompok Yang Terfasilitasi Prasarana Perkebunan (Kelompok)			1.738.746.067,00
	Kordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)		4	1.726.445.009,00	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)			
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Intensifikasi Tanaman Perkebunan (Persen)		78,22	9.983.355.921,62	Persentase Luas Areal Intensifikasi Tanaman Perkebunan (Persen)			
	Pengawasan Peredara Sarana Pertanian	Luas Areal Intensifikasi Tanaman Perkebunan (Ha)		3.858	9.983.355.921,62	Luas Areal Intensifikasi Tanaman Perkebunan (Ha)			
	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian (Laporan)		4	9.983.355.921,62	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian (Laporan)			
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Status Kesehatan Hewan (Persen)		98	1.050.879.570,70	Persentase Status Kesehatan Hewan (Persen)		98	818.219.308,55
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prevalensi Penyakit Hewan Menular/Zoonosis (Persen)		2	1.050.879.570,70	Prevalensi Penyakit Hewan Menular/Zoonosis (Persen)		2	818.219.308,55
3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		1	1.050.879.570,70	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		1	818.219.308,55
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Unit Usaha yang Memiliki Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) (Persen)				Persentase Unit Usaha yang Memiliki Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) (Persen)		87	767.414.843,63
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Produk Peternakan yang Dibina (Unit)			767.414.843,00	Jumlah Unit Usaha Produk Peternakan yang Dibina (Unit)		6	767.414.843,63
3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM (Laporan)		1	767.414.843,00	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM (Laporan)		1	767.414.843,63

3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan (Persen)		100%	300.251.305,91	Persentase Penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan (Persen)		100%	233.776.945,30
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Kelompok Yang Terfasilitasi Penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan (Kelompok)		28	300.251.305,91	Jumlah Kelompok Yang Terfasilitasi Penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan (Kelompok)		32	233.776.945,30
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)		700	300.251.305,91	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)		800	233.776.945,30
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Usaha Perkebunan yang memenuhi standar usaha Perkebunan (Persen)		100%	225.188.479	Persentase Usaha Perkebunan yang memenuhi standar usaha Perkebunan (Persen)		100%	175.332.709
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Usaha Perkebunan yang Dibina (Unit Usaha)		40	225.188.479	Jumlah Usaha Perkebunan yang Dibina (Unit Usaha)		50	175.332.709
3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Ha)		100	225.188.479,44	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Ha)		100	175.332.708,98
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Perkebunan dan Peternakan yang Naik Kelas (Persen)		8,92	600.502.611,83	Persentase Kelompok Perkebunan dan Peternakan yang Naik Kelas (Persen)		10,71	467.553.890,60
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Perkebunan dan Peternakan yang sudah menerapkan teknologi (Kelompok)		16	600.502.611,83	Jumlah Kelompok Perkebunan dan Peternakan yang sudah menerapkan teknologi (Kelompok)		18	467.553.890,60
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)		112	600.502.611,83	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)		112	467.553.890,60
UPT PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN					858.020.302,00				931.625.724,00
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat UPT Proteksi Tanaman Perkebunan (Indeks)		85,5	126.181.213,04	Indeks Kepuasan Masyarakat UPT Proteksi Tanaman Perkebunan (Indeks)		86	98.245.229,77
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai kematangan penerapan SPBE pada perangkat daerah (Nilai)		55,71	2.964.147,11	Nilai kematangan penerapan SPBE pada perangkat daerah (Nilai)		65,71	2.307.897,56
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	2.964.147,11	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	2.307.897,56
3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan pengadaan Barang/jasa pemerintah pada SPSE (Nilai)		73	28.262.730,53	Nilai Kepatuhan Pencatatan pengadaan Barang/jasa pemerintah pada SPSE (Nilai)		75	22.005.482,34
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		1	28.262.730,53	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		1	22.005.482,34
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai pengukuran kualitas pelayanan publik perangkat daerah		75	31.651.445,13	Nilai pengukuran kualitas pelayanan publik perangkat daerah		75	24.643.949,96
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	31.651.445,13	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	24.643.949,96
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara (Persen)		100%	63.302.890,27	Persentase barang milik daerah yang dipelihara (Persen)		100\$%	49.287.899,91
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)		11	31.651.445,13	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)		11	24.643.949,96
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		68	31.651.445,13	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		68	24.643.949,96
3.27.05.1.01	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Persentase Penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan pada Kelompok Terapan (Persen)		35	975.816.744,22	Persentase Penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan pada Kelompok Terapan (Persen)		38	759.775.072,23
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Kelompok terapan Penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan (Kelompok)		24	525.439.785,35	Jumlah Kelompok terapan Penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan (Kelompok)		32	409.109.654,28
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani		600	525.439.785,35	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani		800	409.109.654,28
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Produksi Agen Pengendali Hayati (APH) (Liter)		12.000	450.376.958,87	Jumlah Produksi Agen Pengendali Hayati (APH) (Liter)		16000	350.665.417,95
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan (Ha)		1.200	450.376.958,87	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan (Ha)		1600	350.665.417,95
UPTD PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN					2.434.513.039,79				1.895.522.219,31
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat UPT PMSB Tanaman Perkebunan (Indeks)		85,5	407.816.724,88	Indeks Kepuasan Masyarakat UPT PMSB Tanaman Perkebunan (Indeks)		86	317.527.838,54
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai kematangan penerapan SPBE pada perangkat daerah (Nilai)		55,71	60.553.290,95	Nilai kematangan penerapan SPBE pada perangkat daerah (Nilai)		65,71	47.147.050,18
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	60.553.290,95	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	47.147.050,18
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan pengadaan Barang/jasa pemerintah pada SPSE (Nilai)		73	31.646.962,21	Nilai Kepatuhan Pencatatan pengadaan Barang/jasa pemerintah pada SPSE (Nilai)		75	24.640.459,54
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		1	24.640.459,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		1	24.640.459,54
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai pengukuran kualitas pelayanan publik perangkat daerah (Nilai)		75	52.134.846,67	Nilai pengukuran kualitas pelayanan publik perangkat daerah (Nilai)		75	40.592.413,61
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		1	52.134.846,67	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		1	40.592.413,61
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara (Persen)		100%	263.481.625,05	Persentase barang milik daerah yang dipelihara (Persen)		100%	205.147.915,21
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)		12	37.641.845,29	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)		0	29.308.101,03
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		40	225.839.779,76	Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		40	175.839.814,18
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Benih Bersertifikat Yang Beredar (Persen)		87	2.026.696.314,92	Persentase Benih Bersertifikat Yang Beredar (Persen)		89	1.577.994.380,78
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan Yang Tersertifikasi (Benih)		827.951	1.125.942.397,18	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan Yang Tersertifikasi (Benih)		836.231	876.663.544,88
3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikasi Benih (Sertifikat)		75	1.125.942.397,18	Jumlah Sertifikasi Benih (Sertifikat)		80	876.663.544,88
	Pengawasan Mutu, Penyediaan , dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Produsen Benih Yang Mematuhi Standar Mutu Benih Tanaman Perkebunan (Produsen Benih)		41	900.753.917,74	Jumlah Produsen Benih Yang Mematuhi Standar Mutu Benih Tanaman Perkebunan (Produsen Benih)		43	701.330.835,90

3.27.02.1.02.0020	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga		4	900.753.917,74	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga		4	701.330.835,90
UPT. PEMBIBITAN TERNAK					2.875.544.398,94				2.238.911.113,52
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat UPT Pembibitan Ternak (Indeks)		85,5	415.771.406,04	Indeks Kepuasan Masyarakat UPT Pembibitan Ternak (Indeks)		86	323.721.387,16
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai kematangan penerapan SPBE pada perangkat daerah (Nilai)		55,71	27.719.885,10	Nilai kematangan penerapan SPBE pada perangkat daerah (Nilai)		65,71	21.582.820,57
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	27.719.885,10	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	21.582.820,57
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan pengadaan Barang/jasa pemerintah pada SPSE (Nilai)		73	67.887.437,80	Nilai Kepatuhan Pencatatan pengadaan Barang/jasa pemerintah pada SPSE (Nilai)		75	52.857.448,14
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		1	67.887.437,80	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		1	52.857.448,14
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai pengukuran kualitas pelayanan publik perangkat daerah (Nilai)		75	136.138.538,61	Nilai pengukuran kualitas pelayanan publik perangkat daerah (Nilai)		75	105.998.045,86
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		1	136.138.538,61	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		1	105.998.045,86
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara (Persen)		100%	184.025.544,54	Persentase barang milik daerah yang dipelihara (Persen)		100%	143.283.072,59
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang dipelihara (Unit)		15	67.887.437,80	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang dipelihara (Unit)		15	52.857.448,14
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)		50	116.138.106,74	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)		50	90.425.624,44
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Angka Kelahiran Ternak dari Teknologi Reproduksi UPT Pembibitan Ternak (Ekor)		700	2.459.772.992,90	Angka Kelahiran Ternak dari Teknologi Reproduksi UPT Pembibitan Ternak (Ekor)		800	1.915.189.726,36
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Produksi Straw Semen Beku Ternak (Straw)		40.000	1.915.189.725,00	Produksi Straw Semen Beku Ternak (Straw)		45.000	1.519.550.144,45
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		1	1.519.550.144,00	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		1	1.519.550.144,45
	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Produksi Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan Konsentrat (Kg)		145.880	508.139.504,46	Produksi Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan Konsentrat (Kg)		145.930	395.639.581,91
	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Dokumen)		1	508.139.504,46	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Dokumen)		1	395.639.581,91
UPT. VETERINER					2.437.562.108,34				1.897.896.237,07
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat UPT Veteriner (Indeks)		85,5	245.727.575,17	Indeks Kepuasan Masyarakat UPT Veteriner (Indeks)		86	191.324.536,370
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai kematangan penerapan SPBE pada perangkat daerah (Nilai)		55,71	33.875.966,96	Nilai kematangan penerapan SPBE pada perangkat daerah (Nilai)		65,71	26.375.972,13
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	33.875.966,96	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	26.375.972,13
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan pengadaan Barang/jasa pemerintah pada SPSE (Nilai)		73	48.351.737,89	Nilai Kepatuhan Pencatatan pengadaan Barang/jasa pemerintah pada SPSE (Nilai)		75	37.646.869,01
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		33	48.351.737,89	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		33	37.646.869,01
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai pengukuran kualitas pelayanan publik perangkat daerah (Nilai)		75	82.174.965,62	Nilai pengukuran kualitas pelayanan publik perangkat daerah (Nilai)		75	63.981.778,15
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	82.174.965,62	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	63.981.778,15
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara (Persen)		100%	81.324.904,69	Persentase barang milik daerah yang dipelihara (Persen)		100%	63.319.917,09
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		12	40.662.452,35	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		12	31.659.958,54
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Srana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		50	40.662.452,35	Jumlah Srana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		50	31.659.958,54
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Surat Keterangan Produk Hewan (SKPH) Yang Diterbitkan (Dokumen)		725	2.191.834.533,17	Jumlah Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Surat Keterangan Produk Hewan (SKPH) Yang Diterbitkan (Dokumen)		770	1.706.571.700,69
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Sampel Pangan Asal Hewan Yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan (Sampel)		352	900.753.917,74	Jumlah Sampel Pangan Asal Hewan Yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan (Sampel)		362	701.330.835,90
3.27.04.1.02.0006	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah Kegiatan Pengawasan Peredaran Produk Hewan (Laporan)		4	900.753.917,74	Jumlah Kegiatan Pengawasan Peredaran Produk Hewan (Laporan)		1	701.330.835,90
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Sampel Hewan Ternak sesuai Standar Hasil Uji (Sampel)		16010	1.291.080.615,43	Jumlah Sampel Hewan Ternak sesuai Standar Hasil Uji (Sampel)			1.005.240.864,79
3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi (Unit)		1	1.291.080.615,43	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi (Unit)		1	1.005.240.864,79
UPT. BALAI PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN					1.020.036.448,42				794.204.722,21
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkemunan (Indeks)		85,5	179.332.791,86	Indeks Kepuasan Masyarakat UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkemunan (Indeks)		86	139.629.275,37
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai kematangan penerapan SPBE pada perangkat daerah (Nilai)		55,71	33.926.634,12	Nilai kematangan penerapan SPBE pada perangkat daerah (Nilai)		65,71	26.415.421,79
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	33.926.634,12	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	26.415.421,79
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan pengadaan Barang/jasa pemerintah pada SPSE (Nilai)		73	33.926.634,12	Nilai Kepatuhan Pencatatan pengadaan Barang/jasa pemerintah pada SPSE (Nilai)		75	26.415.421,79
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1	33.926.634,12	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1	26.415.421,79
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai pengukuran kualitas pelayanan publik perangkat daerah		75	28.302.732,74	Nilai pengukuran kualitas pelayanan publik perangkat daerah		75	22.036.628,23
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum		1	28.302.732,74	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum		1	22.036.628,23
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara (Persen)		100%	83.176.790,89	Persentase barang milik daerah yang dipelihara (Persen)		100%	64.761.803,56
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		7	41.588.395,44	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		7	35.158.703,29
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		34	41.588.395,44	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		34	35.158.703,29
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Benih Kebun Sumber Benih (KSB) Kewenangan Dinas (Persen)		40,75	840.703.656,56	Persentase Peningkatan Produksi Benih Kebun Sumber Benih (KSB) Kewenangan Dinas (Persen)		11,67	654.575.446,84
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Produksi Benih Tanaman Rempah dan Semusim dari Kebun Sumber Benih (KSB) Kewenangan Dinas (Benih)		1.087.251	375.314.132,39	Produksi Benih Tanaman Rempah dan Semusim dari Kebun Sumber Benih (KSB) Kewenangan Dinas (Benih)		1.195.976	292.221.181,63

3.27.02.1.02.0020	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)		4	375.314.132,39	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)		4	292.221.181,63
	Pengawasan Mutu, Penyediaan, dan Peredaran Benih Tanaman	Produksi Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar dari Kebun Sumber Benih (KSB) Kewenangan Dinas (Benih)		1.084.009	465.389.524,17	Produksi Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar dari Kebun Sumber Benih (KSB) Kewenangan Dinas (Benih)		1.228.567	362.354.265,22
	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat perkebunan berbentuk Mata Tumbuh (Mata)		1.083.509	225.188.479,44	Jumlah benih bersertifikat perkebunan berbentuk Mata Tumbuh (Mata)		1.227.567	175.332.708,98
3.27.02.1.02.0012	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat perkebunan berbentuk Batang (Batang)		500	240.201.044,73	Jumlah benih bersertifikat perkebunan berbentuk Batang (Batang)		1000	187.021.556,24

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 ini telah disusun berdasarkan Rencana Strategis 2025 - 2029, yang merupakan penjabaran Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah secara menyeluruh yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026, yaitu sebanyak 6 Program dan 16 Kegiatan serta 32 Sub Kegiatan yang merupakan implementasi dari Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

Dengan disusunnya dokumen Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan dapat lebih matang, sehingga dapat mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban seluruh program dan kegiatan, serta mampu memberi kontribusi positif terhadap capaian target pembangunan provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya Renja Tahun 2026 ini juga merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun Anggaran 2026, yang juga menjadi acuan kerja pada akhir periode RENSTRA dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan *good governance*, khususnya di lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. Dimana Keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun 2026 ini akan sangat menentukan pencapaian target kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dalam Renstra 2025-2029.